LAPORAN KINERJA 2025

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura



Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2026

LAPORAN KINERJA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

TAHUN 2025

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2025

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAKIN UNIT KERJA LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Unit Kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi Tanggung jawab manajemen Unit Kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja tersebut.

Jakarta, 23 Januari 2025

Koordinator Tim Reviu

Kapoksi PE BRMP Perkebunan



Kapoksi PE BRMP Tanaman Pangan



Kapoksi PPT BRMP Biogen



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura (PPMP Hortikultura) tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Satuan Kerja PPMP Hortikultura yang mengelola keuangan mandiri dalam melaksanakan kinerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah dalam mendukung pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab.

Penyusunan LAKIN PPMP Hortikultura berdasarkan PERMENPAN RB No. 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN RB No. 12/2015 tentang Pelaksanaan Sistem AKIP. PPMP Hortikultura telah menyusun LAKIN berisi kinerja internal baik Satker PPMP Hortikultura maupun Unit Pelaksana Teknis dibawahnya, yaitu Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran di Lembang, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika di Solok, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias di Segunung, serta Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika di Tlekung selama tahun 2025. LAKIN disusun berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis 2025-2029 dengan melaksanakan empat sasaran kegiatan yang dijabarkan menjadi empat indikator kinerja sasaran.

LAKIN PPMP Hortikultura Tahun 2025 diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program juga sebagai umpan balik dalam memperbaiki acuan dan meningkatkan kinerja PPMP Hortikultura di tahun yang akan datang. Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian LAKIN PPMP Hortikultura ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk perbaikan kinerja PPMP Hortikultura ke depan.

Bogor, Januari 2026
Kepala Pusat

Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P., M.Si.
NIP 197804232002122002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR LAMPIRAN ix
IKHTISAR EKSEKUTIF 1
BAB I 7
1.1. Latar Belakang 7
1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 8
1.3. Tantangan dan Peran Strategis 10
BAB II 15
2.1. Rencana Strategis 15
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 18
BAB III 23
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 23
3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 24
3.1.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 34
3.1.4. Capaian Kinerja Lainnya 36
3.2. Realisasi Anggaran 70
3.2.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 76
3.2.2. Hibah 78
BAB IV 82
LAMPIRAN 86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan PPMP Hortikultura 17

Tabel 2. Perjanjian Kinerja PPMP Hortikultura Tahun 2025 19

Tabel 3. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Renstra PPMP Hortikultura Tahun 2025 24

Tabel 4. Target Persentase Produk Usahatani Hortikultura yang Tersertifikasi PPMP Hortikultura tahun 2025-2029 berdasarkan Renstra 25

Tabel 5. Target Meningkatnya Adopsi Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura PPMP Hortikultura tahun 2025-2029 berdasarkan Renstra 26

Tabel 6. Capaian Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Lingkup PPMP Hortikultura 28

Tabel 7. Komponen Pengungkit dalam Penilaian Zona Integritas PPMP Hortikultura 29

Tabel 8. Perbandingan capaian Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada PPMP Hortikultura tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya 30

Tabel 9. Perbandingan realisasi Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada PPMP Hortikultura tahun 2025 dengan Renstra 31

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup PPMP Hortikultura (berdasarkan PMK) 32

Tabel 11. Perbandingan capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPMP Hortikultura TA 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya ... 33

Tabel 12. Perbandingan realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada PPMP Hortikultura tahun 2025 dengan Renstra 33

Tabel 13. Monitoring penggunaan SBK PPMP Hortikultura Tahun 2025 35

Tabel 14. Nilai Efisiensi BPP lingkup PPMP Hortikultura 35

Tabel 15. Target dan Capaian Kegiatan Swasembada Pangan TA.2025 40

Tabel 16. Capaian kinerja lainnya selama 2025 57

Tabel 17. Daftar Kegiatan Hirata 66

Tabel 18. Realisasi DIPA Desember 2025 UK/UPT Lingkup PPMP Hortikultura Berdasarkan Pagu Total dan Pagu Efektif 71

Tabel 19.Anggaran Per Jenis Belanja lingkup PPMP Hortikultura TA. 2025 71

Tabel 20. Rincian Pagu Anggaran per Output Kegiatan PPMP Hortikultura TA. 2025 72

Tabel 21. Rincian Pagu Anggaran per Output Kegiatan BPP Tanaman Sayuran TA. 2025 73

Tabel 22. Rincian Pagu Anggaran per Output Kegiatan BPP Tanaman Buah Tropika TA. 2025 73

Tabel 23. Rincian Pagu Anggaran per Output Kegiatan BPP Tanaman Hias TA. 2025 74

Tabel 24. Rincian Pagu Anggaran per Output Kegiatan BPP Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika TA. 2025 74

Tabel 25. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran lingkup PPMP Hortikultura Tahun 2024 dan Tahun 2025 Menurut Jenis Belanja 75

Tabel 26. Rekapitulasi PNBP Tahun 2025 Lingkup PPMP Hortikultura 76

Tabel 27. Rekapitulasi Penambahan Dana Hibah Lingkup PPMP Hortikultura ... 78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PPMP Hortikultura 9
Gambar 2. Komponen unsur penilaian ZI PPMP Hortikultura 29
Gambar 3. Dashboard Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPMP Hortikultura TA 2025 32
Gambar 4. Nilai efisiensi SBK tahun 2025 35
Gambar 5. Sertifikat ISO 9001:2015 PPMP Hortikultura 36
Gambar 6. Indonesia sebagai Tuan Rumah 19th AARNET Steering Committee Meeting 38
Gambar 7. PPMP Hortikultura Raih Predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementan 2025 39
Gambar 8. Piagam penghargaan dari KPPN Bogor 39
Gambar 9. Kegiatan Swasembada Pangan Kabupaten Ende 42
Gambar 10. Kegiatan Swasembada Pangan di Kabupaten Nagekeo 42
Gambar 11. Kegiatan Swasembada Pangan di Kabupaten Pidie 43
Gambar 12. Penghargaan Kepala Bagian Terbaik Lingkup BRMP 43
Gambar 13. Pemeliharaan Tanaman Bawang Putih 45
Gambar 14. Pelaksanaan Rapat Teknis Kesatu 47
Gambar 15. Pelaksanaan Rapat Teknis Kedua 48
Gambar 16. Konsultasi Publik dan Konsensus 49
Gambar 17. Jajak Pendapat 50
Gambar 18. Implementasi Soil sensor untuk Deteksi Cepat Status Hara pada Produksi Benih Kentang di Kabupaten Garut 51
Gambar 19. Implementasi Kit Deteksi Cepat Penyakit Huanglongbing (HLB) untuk Mendeteksi Kesehatan Benih dan Tanaman Jeruk di Kabupaten Sambas 53
Gambar 20. Sertifikat ISO 9001:2015 Lingkup Balai 53
Gambar 21. Sertifikat ISO 9001:2015 untuk Lingkup Benih Bermutu 54
Gambar 22. Sertifikat Akreditasi ISO 17025:2017 Laboratorium Penguji 54
Gambar 23. Pemberian Akreditasi terhadap Perluasan Ruang Lingkup Laboratorium Penguji 55

Gambar 24. Hasil Penilaian Tahap Pertama Monev KIP Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 (Predikat Informatif) 55

Gambar 25. Piagam Penghargaan Sebagai Peserta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 56

Gambar 26. Piagam Penghargaan Sebagai Peringkat IX Kategori Informatif Unit Kerja Eselon III Dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 56

Gambar 27. Sertifikat Penghargaan Sebagai Pejabat Fungsional Teknis Non Pertanian Jenjang Keterampilan Terbaik Tahun 2025 57

Gambar 28. Koordinasi LTT di Kab. Pasaman 59

Gambar 29. Koordinasi LTT di Kab. Tanah Datar 59

Gambar 30. Koordinasi kegiatan ICARE dengan PIU BRMP Jatim 60

Gambar 31. Koordinasi pelaksanaan monitoring dan pendampingan kegiatan pengembangan budidaya tanaman buah tropika pada program Community forest PT. Pupuk Indonesia 60

Gambar 32. Piagam Perhargaan transaksi keuangan terbaik Lingkup KKPN Sukabumi 62

Gambar 33. Sertifikat SNI ISO BPP Tanaman Hias..... 62

Gambar 34. Penanaman benih padi pada LTT di Kalimantan Selatan 63

Gambar 35. Brigade Pangan (BP) Patriot Maju Makmur di lokasi Oplah 64

Gambar 36. Pengelolaan tanaman sayuran dan ternak 64

Gambar 37. Lokasi eksplorasi: (a) Kulon Progo Regency dan (b) Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta 65

Gambar 38. Dokumentasi kegiatan ICARE : PTKJS 68

Gambar 39. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Produksi Benih Sumber Hortikultura (Bawang Putih) 69

Gambar 40. Perbandingan Capaian Realisasi PNBP 2024 dan 2025 78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SOP Penyusunan LAKIN 87

Lampiran 2. SK tim Penyusun LAKIN 89

Lampiran 3. Keragaan SDM Lingkup PPMP Hortikultura TA 2025 94

Lampiran 4. Sasaran Kegiatan, Indikator Sasaran Kegiatan, dan Realisasi 2025 95

Lampiran 5. Perubahan Perjanjian Kinerja PPMP Hortikultura Tahun 2025 96

Lampiran 6. Nilai ZI Tahun 2025 106

Lampiran 7. Daftar SNI Lingkup PPMP Hortikultura TA. 2025 113

Lampiran 8. Matriks Renaksi 114

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura (PPMP Hortikultura) merupakan salah satu Unit Kerja di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, PPMP Hortikultura mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian hortikultura.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program perakitan dan modernisasi pertanian yang konsisten dan kontinyu, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Rencana Strategis ini disusun mengacu kepada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029; Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029; dan Renstra BRMP Tahun 2025-2029. Renstra merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai, termasuk strategi, kebijakan, program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Selanjutnya sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi/Unit Kerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura menyusun Laporan Kinerja (LAKIN). LAKIN disusun oleh unit kerja yang mengelola keuangan mandiri untuk melaksanakan kinerjanya sesuai tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah dalam mendukung pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. LAKIN disusun secara konsisten, komprehensif, realistis dan mempunyai hubungan yang logis dengan bahan dasar yaitu Renstra, DIPA, RKA-KL, dan Perjanjian Kinerja (PK).

BRMP memiliki visi "Mewujudkan lembaga unggul dalam perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan modern yang inovatif dalam mendukung pertanian maju". Untuk mendukung tercapainya visi BRMP, pada tahun anggaran 2025 Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura menetapkan 4 (empat) sasaran yang masing-masing sasaran diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yang harus dipenuhi. Adapun indikator kinerja dan capaiannya adalah sebagai berikut: 1) Persentase Produk Usahatani Hortikultura yang Tersertifikasi tidak ada target dan capaian dikarenakan adanya blokir anggaran; 2) Persentase Peningkatan Adopsi Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura tidak ada target dan capaian dikarenakan adanya blokir anggaran; 3)

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura dengan capaian 88,17; dan 4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura dengan capaian 99,79. Indikator kinerja sasaran strategis yang ditargetkan dalam tahun 2025 telah tercapai dan bahkan melebihi target yang ditetapkan dengan rerata capaian realisasi kinerja 105,49% (**sangat berhasil**).

Dalam pencapaian sasaran indikator kinerja untuk menunjang kegiatan perakitan dan modernisasi hortikultura dan manajemen, pada tahun 2025 lingkup PPMP Hortikultura mengelola anggaran sebesar Rp65.303.274.000,-. Alokasi anggaran per UK/UPT lingkup PPMP Hortikultura tahun 2025 adalah sebagai berikut: Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Rp8.429.548.000,-, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran Rp17.527.337.000,-, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika Rp16.281.997.000,-, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias Rp12.587.390.000,-, dan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Rp10.477.002.000,-. Selama kurun waktu TA. 2025, terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp328.790.000 dalam rangka efisiensi sehingga Pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp64.974.484.000.

Selama periode tahun anggaran 2025, DIPA PPMP Hortikultura mengalami 18 (delapan belas) kali revisi anggaran, hal ini disebabkan adanya penghematan (*refocusing*) anggaran, revisi POK, penghapusan pagu dari PNBP, dan adanya dana hibah. Pada umumnya capaian kinerja akuntabilitas keuangan PPMP Hortikultura telah berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Hal ini dapat di lihat dari capaian realisasi anggaran lingkup PPMP Hortikultura sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp64.508.969.199,- (98,78%) yang terdiri dari belanja pegawai Rp25.089.333.138,- (99,46%), belanja barang Rp38.555.722.335,- (98,43%), dan belanja modal Rp863.201.626,- (95,14%).

Realisasi masing-masing Satker terhadap Pagu Total ialah sebagai berikut: Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura 97,96%, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran 99,04%, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika 98,65%, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias 99,01%, dan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika 98,93%. Sementara itu, realisasi berdasarkan Pagu Efektif adalah sebagai berikut: Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura 99,55%, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran 99,31%, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika 99,01%, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias 99,41%, dan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika 99,30%.

Dilihat dari efisiensi kinerjanya, PPMP Hortikultura memiliki nilai efisiensi 100%, yang didukung indikator kinerja yaitu; (1) Persentase Produk Usahatani

Hortikultura yang Tersertifikasi; (2) Persentase Peningkatan Adopsi Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura; (3) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura; dan 4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

Realisasi PNBP lingkup PPMP Hortikultura Tahun 2025 sebesar Rp2.124.635.950,- dengan rincian untuk masing-masing UK/UPT sebagai berikut: Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Rp50.025.000,-, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran Lembang Rp705.378.630,- Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika Solok Rp734.058.620,-, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias Segunung Rp187.553.000,- dan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Tlekung Rp447.620.700,-.

AGRO MODERN

BAB I
PENDAHULUAN



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebagai salah satu negara berkembang, pertanian di Indonesia menjadi pilar utama ekonomi dan memiliki potensi strategis. Dengan perkembangan teknologi dan tantangan global, pertanian terus berkembang menjadi lebih modern dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung modernisasi pertanian tersebut dan memperkuat peran Kementerian Pertanian dalam menghadapi tantangan global, dibentuklah sebuah institusi baru bernama Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024, tentang Kementerian Pertanian. Pembentukan institusi ini menjadi langkah strategis dalam mendukung teknologi pertanian yang terintegrasi tetap menjadi prioritas bagi Kementerian Pertanian dan berperan penting dalam merancang, menguji, serta menyebarluaskan teknologi pertanian modern yang aplikatif dan tepat guna.

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura (PPMP Hortikultura) merupakan salah satu Unit Kerja di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, PPMP Hortikultura merupakan unit kerja strategis di lingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki mandat utama dalam perakitan, pengembangan, dan modernisasi teknologi pertanian hortikultura. Pada tahun 2025, PPMP Hortikultura memegang peranan penting dalam mendukung transformasi sistem pertanian nasional menuju pertanian hortikultura yang modern, berdaya saing, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha dan kesejahteraan petani.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah wajib Menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

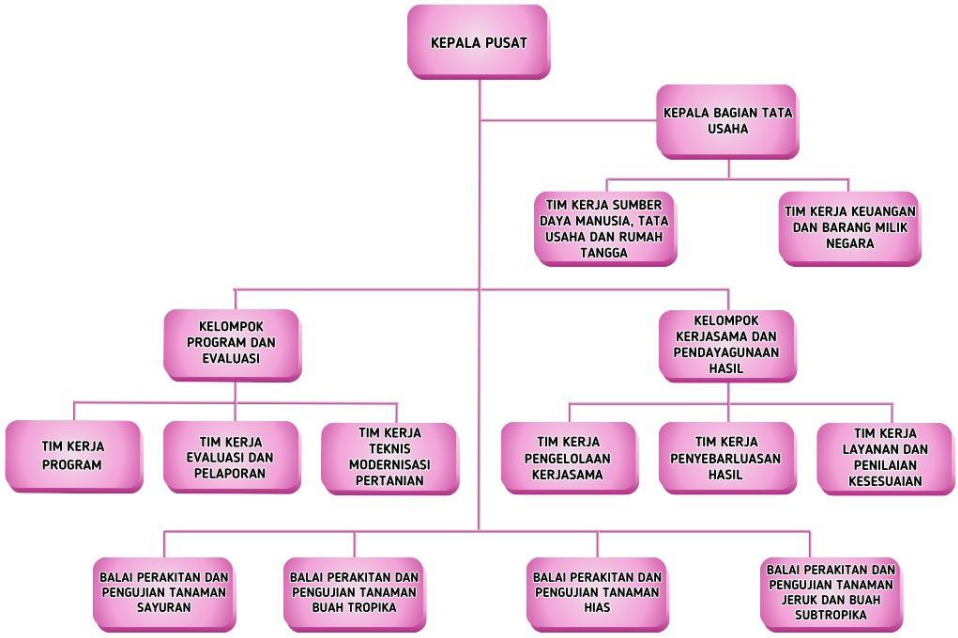
Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, PPMP Hortikultura Menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan sumber

daya dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi alternatif yang dipertimbangkan sebagai masukan perbaikan dalam penyusunan rencana kerja pada tahun-tahun yang akan datang sehingga terwujud *continuous improvement* dalam pencapaian tujuan organisasi. SOP penyusunan LAKIN dapat di lihat pada Lampiran 1 dan SK tim penyusun LAKIN dapat di lihat pada Lampiran 2.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Permentan Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura merupakan unit kerja Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dengan tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian hortikultura. Dalam melaksanakan tugasnya, PPMP Hortikultura menyelenggarakan fungsi yaitu: (1) Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, program dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi pertanian hortikultura; (2) Pelaksanaan tugas di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi pertanian hortikultura; (3) Koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang hortikultura; (4) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, penyebarluasan, dan modernisasi pertanian hortikultura, serta perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang hortikultura; dan (5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

Untuk melaksanakan mandat, tugas, dan fungsinya, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura didukung sejumlah pejabat fungsional dan tenaga administrasi yang tersebar di empat (4) balai perakitan dan pengujian yaitu Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias, dan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika. Struktur organisasi PPMP Hortikultura disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi PPMP Hortikultura

Dengan semakin berkembangnya pembangunan pertanian, khususnya sub sektor hortikultura, maka diperlukan dukungan sumber daya yang memadai (SDM, pendanaan dan sarana-prasarana). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPMP Hortikultura didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang tugasnya masing-masing. Jumlah pegawai yang bersatatus sebagai PNS pada Satker lingkup PPMP Hortikultura per 31 Desember 2025 berjumlah 384 orang. Jumlah PNS berpendidikan S3 16 orang, S2 sebanyak 51 orang, S1/D4 sebanyak 117 orang, dan pegawai dengan kualifikasi pendidikan di bawah S1 sebanyak 200 orang. Jabatan fungsional yang ada di PPMP Hortikultura dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain Analis Standardisasi (ASTA), Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), Pengawas Benih Tanaman (PBT), Analis Kebijakan, dan lain sebagainya. Kecukupan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai kebutuhan akan terus dikembangkan dalam lima tahun ke depan melalui rekruitmen berbasis kompetensi dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan jangka pendek dan jangka panjang baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain sumber daya manusia, sarana prasarana juga diperlukan untuk mendukung terlaksananya program teknis peningkatan nilai tambah dan daya saing industri serta Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan juga

program dukungan manajemen. Sarana prasarana yang dimiliki oleh satker lingkup PPMP Hortikultura antara lain: Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP) di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatra Barat, Banten, dan Sumatra Utara, sarana laboratorium pengujian, rumah kassa, gudang benih, peralatan laboratorium, UPBS, dan lain sebagainya.

1.3. Tantangan dan Peran Strategis

Subsektor hortikultura memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan pertanian nasional karena kontribusinya terhadap pemenuhan gizi masyarakat, diversifikasi pangan, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi untuk pasar domestik dan ekspor. Dalam konteks tersebut, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura diarahkan untuk menjadi motor penggerak modernisasi hortikultura melalui perakitan inovasi teknologi, sistem produksi cerdas, serta model pengelolaan hortikultura yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna.

Memasuki tahun 2025, PPMP Hortikultura dihadapkan pada dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks. Perubahan iklim, degradasi sumber daya lahan dan air, fluktuasi pasar hortikultura, serta peningkatan tuntutan terhadap mutu, keamanan, dan keberlanjutan produk menjadi tantangan eksternal yang signifikan. Selain itu, arah kebijakan nasional yang menekankan percepatan modernisasi pertanian, digitalisasi, mekanisasi, serta penguatan hilirisasi menuntut PPMP Hortikultura untuk menghasilkan inovasi yang aplikatif, terintegrasi, dan berdampak langsung bagi pengguna.

Di sisi internal, PPMP Hortikultura menghadapi sejumlah permasalahan strategis (*strategic issues*) yang perlu ditangani secara sistematis. Permasalahan tersebut meliputi belum optimalnya integrasi perakitan teknologi dengan kebutuhan spesifik lokasi dan pengguna, keterbatasan adopsi teknologi modern oleh petani dan pelaku usaha hortikultura, serta perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang perakitan dan modernisasi teknologi. Selain itu, tantangan dalam tata kelola kelembagaan, pemanfaatan sarana dan prasarana modernisasi pertanian, serta penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun lembaga riset dan Pendidikan masih menjadi isu strategis yang perlu ditingkatkan.

Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang tersebut, PPMP Hortikultura pada tahun 2025 dituntut untuk memperkuat perannya sebagai institusi yang mampu menjembatani inovasi teknologi dengan implementasi di lapangan. Pendekatan perakitan dan modernisasi pertanian yang terintegrasi, berbasis kebutuhan pengguna, serta berorientasi pada peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan menjadi kunci dalam menjawab isu-isu strategis

organisasi. Dengan demikian, PPMP Hortikultura diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan sistem hortikultura nasional yang modern, tangguh, dan berdaya saing.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Pusat Perakitan dan Modernisasi Tanaman Hortikultura (PPMP Hortikultura) dibawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mengampu kegiatan strategis dalam perekayasaan, perakitan, pengujian, diseminasi, dan penerapan teknologi pertanian tanaman hortikultura. Tahun 2025 menjadi tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis PPMP Hortikultura 2025-2029 sekaligus penguatan peran kelembagaan pascatransformasi organisasi dari standarisasi menuju perakitan dan modernisasi pertanian. Perencanaan strategis difokuskan pada konsolidasi kebijakan, penajaman sasaran strategis, serta penguatan fondasi implementasi program berbasis teknologi terapan dan inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani, dan ketahanan pangan nasional.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai, termasuk strategi, kebijakan, program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah. Namun dengan adanya perubahan nomenklatur kerja Eselon 1 berdasarkan Perpres Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, maka Rencana Strategis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian disusun dengan periode Tahun 2025-2029 mengacu pada tiga dokumen penting yaitu sasaran utama pembangunan nasional RPJMN 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2025-2029, dan Renstra BRMP Tahun 2025-2029. RPJMN tersebut dirancang dengan mengintegrasikan Visi dan Misi Presiden bersama dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

Dengan mengacu pada visi Kementerian Pertanian yaitu "Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" maka visi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura adalah "Mewujudkan Lembaga Unggul dalam Perekayasaan dan Perakitan Teknologi Pertanian Hortikultura Terapan Modern yang Inovatif dalam Mendukung Pertanian Maju".

Untuk mencapai visi tersebut, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura mempunyai misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian hortikultura terapan yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional;
2. Mengembangkan prototipe/produk/model teknologi pertanian hortikultura terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian terapan;
4. Memfasilitasi diseminasi dan pemanfaatan hasil perekayasaan teknologi pertanian hortikultura terapan kepada pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian;
5. Membangun kemitraan strategis dan jejaring inovasi dengan lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan pemangku kepentingan lainnya, di dalam maupun luar negeri.

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura maka tujuan yang hendak dicapai selama tahun 2025-2029 adalah:

1. Merumuskan dan melaksanakan pendampingan penerapan standar sehingga diterapkan oleh pelaku usaha;
2. Merakit teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian untuk dimanfaatkan oleh stakeholder untuk meningkatkan produksi.

Sasaran Strategis

Kementerian Pertanian memiliki arah kebijakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif dengan menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas strategis. Strategi tersebut untuk memastikan ketersediaan pangan nasional yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan, serta memperkuat daya saing sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi.

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mendukung Kementerian Pertanian pada Sasaran Strategis: Meningkatnya pendapatan petani; Terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan; dan Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi. Sasaran strategis ini menggambarkan upaya yang dilakukan Pusat Perakitan dan Modernisasi Hortikultura dalam mencapai tujuan yang telah disusun dan ditetapkan.

Dalam rangka mencapai tujuan PPMP Hortikultura dijabarkan melalui sasaran – sasaran kegiatan yang bersifat strategis yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan. Berikut ini adalah tabel sasaran strategis PPMP Hortikultura berdasarkan

tujuan yang akan dicapai selama periode tahun 2025- 2029 yang mengacu dari Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pertanian dan Sasaran Program (SP) di BRMP. Adapun rincian program, kegiatan, output, indikator, target kinerja dan perkiraan alokasi anggaran PPMP Hortikultura tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Lampiran 4.

Tabel 1. Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan PPMP Hortikultura

Sasaran Strategis Kementan	Sasaran Program BRMP	Sasaran Kegiatan PPMP Hortikultura
Meningkatnya pendapatan petani	Meningkatnya sertifikasi usahatani nasional	Tersedianya Produk Usahatani Hortikultura yang Berkualitas
Terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital, smart farming dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	Meningkatnya Adopsi Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang baik, transparan dan akuntabel	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Program dan Kegiatan

Kementerian Pertanian memiliki arah kebijakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif dengan menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas strategis. Strategi tersebut untuk memastikan ketersediaan pangan nasional yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan, serta memperkuat daya saing sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi.

Selaras dengan arah kebijakan Kementerian Pertanian dan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, pada periode perencanaan 2025-2029 PPMP Hortikultura mengampu tiga program utama yang terdiri dari: 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing

Industri, dan 3) Program Dukungan Manajemen. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri diarahkan untuk memperkuat standardisasi dan penilaian kesesuaian, serta meningkatkan mutu produk usaha tani tanaman hortikultura melalui perumusan standar, pengujian, sertifikasi, dan penyediaan sarana pendukung. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas difokuskan pada perakitan dan penerapan teknologi digital, smart farming, dan teknologi modern di seluruh rantai nilai tanaman hortikultura, mulai dari penyiapan prasarana dan sarana, budidaya, pascapanen, pengolahan, hingga pemasaran hasil. Program Dukungan Manajemen diarahkan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, serta pengelolaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada pelayanan prima.

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura memiliki kegiatan yang merupakan cascading dari 3 program yang diampu. Program tersebut memiliki sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan sasaran yaitu Tersedianya Produk Usahatani Hortikultura yang Berkualitas. Capaian sasaran diukur melalui indikator kinerja Persentase Produk Usahatani Hortikultura yang Tersertifikasi.
2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan sasaran yaitu Meningkatnya Adopsi Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura. Capaian sasaran diukur melalui indikator kinerja Persentase Peningkatan Adopsi Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura.
3. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran yaitu 1) Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dan 2) Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Capaian sasaran diukur melalui indikator kinerja: 1) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura dan 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam Upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2025-2029, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pelaksanaan kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan dinamika kebijakan dan revisi

anggaran PPMP Hortikultura.

PK awal tahun 2025 masih menggunakan nomenklatur Pusat Standarisasi Instrumen Hortikultura yang ditandatangani pada 2 Desember 2024 yang terdiri dari 4 IKSK dimana pagu awal sebesar Rp56.906.885.000,-. Pada 26 Mei 2025, PK mengalami perubahan karena adanya perubahan nomenklatur dari Badan Standarisasi Instrumen Pertanian menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dimana anggaran menjadi Rp61.431.885.000,-. Selain itu, terdapat perubahan pada dua target indikator kinerja, yaitu: (1) "Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura" yang semula ditargetkan 86,00 menjadi 82,00; dan (2) indikator kinerja "Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standarisasi Instrumen Hortikultura" dengan target 87,00 berubah menjadi "Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura" dengan target 92,80. Revisi PK yang kedua dilakukan pada 9 Juli 2025 dikarenakan adanya pergantian Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura dengan anggaran yang sama yaitu sebesar Rp61.431.885.000,-.

Pada 19 September 2025 terdapat perubahan PK yang ketiga dikarenakan di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan benih sumber bawang putih sebesar Rp2.604.402.000,- yang menyebabkan perubahan anggaran lingkup PPMP Hortikultura menjadi Rp62.994.259.000,-. Revisi PK keempat dilakukan pada 31 Desember 2025 karena adanya penambahan anggaran kegiatan hibah dan penyesuaian dengan Renstra BRMP 2025-2029. Perjanjian kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura dapat dilihat pada Tabel 2. Perubahan PK tersebut dapat dilihat pada Lampiran 5.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja PPMP Hortikultura Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Produk Usahatani Hortikultura yang Berkualitas	Persentase Produk Usahatani Hortikultura yang Tersertifikasi	-
2	Meningkatnya Adopsi Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura	Persentase Peningkatan Adopsi Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	86,00 Nilai

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	92,00 Nilai

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan pencapaian kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura disebabkan oleh faktor pengawalan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir kegiatan. PPMP Hortikultura melakukan pemantauan terhadap kegiatan secara mingguan, bulanan, dan triwulan. Setiap satker rutin melakukan updating realisasi keuangan dan fisik serta melalui aplikasi e-Monev BSIP, SMART DJA, e-SAKIP, dan e-Monev Bappenas setiap bulan. Keberhasilan pencapaian sasaran juga didorong oleh dukungan manajemen kegiatan, baik aspek pelayanan keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan BMN, serta keberhasilan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup PPMP Hortikultura.

Indikator keberhasilan kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura diukur berdasarkan kriteria keberhasilan (realisasi terhadap target), sasaran kegiatan yang dilaksanakan serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan. Untuk mengukur keberhasilan kinerja ditetapkan empat kategori keberhasilan, yaitu (1) **sangat berhasil**: >100 persen (dinormalisasi maksimal 120%); (2) **berhasil**: 80 - 100 persen; (3) **cukup berhasil**: 60 – 79 persen; dan **tidak berhasil**: <60 persen. Berdasarkan kategori keberhasilan, rerata capaian kinerja PPMP Hortikultura pada tahun 2025 sebesar **105,49%** masuk ke dalam kategori **sangat berhasil** yang berarti bahwa secara umum sasaran telah dapat dicapai.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura berbasis *outcome* dalam lima tahun terakhir sesuai target yang telah ditetapkan berdasarkan manfaat dari *output* yang dihasilkan. Dengan demikian, *output* tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengguna terutama petani dan swasta secara optimal. PPMP Hortikultura mempunyai empat sasaran kegiatan dengan empat indikator kinerja. Realisasi capaian per *output* (kinerja) PPMP Hortikultura tahun 2025 yang mendukung perjanjian kinerja PPMP Hortikultura dapat dilihat pada Tabel 3.

Dalam upaya pencapaian target PK PPMP Hortikultura, telah dilakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik melalui mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup PPMP Hortikultura dengan menyusun laporan kegiatan utama, dan laporan rencana aksi, yang selanjutnya disampaikan ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian secara periodik.

Tabel 3. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Renstra PPMP Hortikultura Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	IKSK	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tersedianya Produk Usahatani Hortikultura yang Berkualitas	1	Persentase Produk Usahatani Hortikultura yang Tersertifikasi	-	-	-
2	Meningkatnya Adopsi Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura	2	Persentase Peningkatan Adopsi Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura	-	-	-
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	86,00 Nilai	88,17 Nilai	102,52
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	92,00 Nilai	99,79 Nilai	108,46
			Rerata Capaian			**105,49**

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Analisis capaian dan evaluasi kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1

- **Tersedianya Produk Usahatani Hortikultura yang Berkualitas**

Produk usahatani hortikultura yang tersertifikasi adalah hasil produksi komoditas hortikultura yang dalam proses budidaya, penanganan pascapanen, hingga pemasarannya telah memenuhi standar tertentu dan dibuktikan melalui sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga berwenang. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa produk telah diproduksi dengan memperhatikan aspek mutu, keamanan pangan, kelestarian lingkungan, serta ketelusuran (*traceability*) sehingga lebih terjamin kualitasnya dan memiliki daya saing lebih tinggi di pasar.

Pada tahun 2025 Capaian kinerja Sasaran Kegiatan 1 dalam Perjanjian Kinerja tidak dapat diukur karena target tidak ditetapkan. Hal tersebut dikarena tidak ada alokasi anggaran dalam RKAKL. Namun dalam Rencana Strategis Periode 2025-2029 terdapat target yang tercantum di tabel dibawah ini, yaitu;

Tabel 4. Target Persentase Produk Usahatani Hortikultura yang Tersertifikasi PPMP Hortikultura tahun 2025-2029 berdasarkan Renstra

	2025	2026	2027	2028	2029
Target Renstra	9,09	18,18	18,18	27,27	27,27

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja Persentase Produk Usahatani Hortikultura yang Tersertifikasi serta alternatif solusi

Kendala dalam pencapaian target indikator sasaran ini adalah:

1. Penyesuaian tugas dan fungsi pasca transformasi. Kebijakan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 01 Tahun 2025 menyebabkan tidak adanya alokasi anggaran dan berimplikasi pada pencapaian indikator ini.
2. Kegiatan fasilitasi sertifikasi, pendampingan penerapan standar budidaya, serta pembinaan kelompok tani belum menjadi prioritas pendanaan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan di tahun 2025.
3. Sertifikasi produk hortikultura memerlukan proses pendampingan yang berkelanjutan. Minimnya kegiatan pendampingan menghambat kesiapan pelaku usaha untuk mengikuti sertifikasi.
4. Rendahnya dorongan insentif bagi pelaku usaha. Tanpa dukungan program, biaya dan proses sertifikasi dianggap cukup berat oleh petani atau kelompok usaha hortikultura.

Langkah antisipasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang adalah:

1. Melakukan pencermatan dan penajaman perencanaan terutama pada postur anggaran 2026 dengan mempertimbangkan prioritas RO yang mendukung

ketercapaian sasaran Kegiatan, dan mengidentifikasi potensi pendanaan di luar APBN.
2. Mendorong kolaborasi agar proses sertifikasi dapat difasilitasi melalui program daerah atau sumber pendanaan lain.
3. Mengintegrasikan fasilitasi sertifikasi dalam kegiatan yang sudah ada.
4. Menggandeng *offtaker*, ritel modern, atau eksportir yang mensyaratkan standar mutu untuk turut mendukung pembiayaan dan pendampingan sertifikasi.



Sasaran kinerja kedua yaitu Meningkatnya Adopsi Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura.

Pada tahun 2025 Capaian kinerja Sasaran Kegiatan 2 dalam Perjanjian Kinerja tidak dapat diukur karena target tidak ditetapkan. Hal tersebut dikarena tidak ada alokasi anggaran dalam RKAKL. Namun dalam Rencana Strategis Periode 2025-2029 terdapat target yang tercantum di tabel dibawah ini yaitu;

Tabel 5. Target Meningkatnya Adopsi Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura PPMP Hortikultura tahun 2025-2029 berdasarkan Renstra

	2025	2026	2027	2028	2029
Target Renstra	7,41	14,81	22,22	25,93	29,63

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja Meningkatnya Adopsi Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura serta alternatif solusi

Hail analisis kendala yang menyebabkan kegagalan kinerja ini di tahun 2025 yaitu:

1. Kebijakan refocusing anggaran sehingga dukungan pembiayaan terhadap kegiatan ini tidak ada.
2. Adopsi teknologi modern memerlukan proses percontohan, pelatihan, serta pendampingan berkelanjutan. Refocusing anggaran menyebabkan kegiatan tersebut tidak berjalan optimal.
3. Minimnya dukungan terhadap lokasi percontohan mengurangi kesempatan petani dan pelaku usaha untuk melihat langsung manfaat teknologi modern.
4. Tanpa program pelatihan yang memadai, kemampuan petani dalam memanfaatkan teknologi digital, aplikasi pertanian, dan sistem berbasis data masih terbatas.
5. Teknologi modern seperti sensor, IoT pertanian, irigasi otomatis, atau mekanisasi presisi masih dianggap mahal oleh petani kecil jika tidak ada dukungan program.
6. Pemanfaatan teknologi seringkali masih parsial (hanya di budidaya), belum terintegrasi hingga pascapanen, pengolahan, dan pemasaran digital.

Langkah antisipasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja tahun 2026 yaitu:

1. Melakukan pencermatan dan penajaman perencanaan terutama pada postur anggaran 2026 dengan mempertimbangkan prioritas RO yang mendukung ketercapaian Sasaran Kegiatan, dan mengidentifikasi potensi pendanaan di luar APBN.
2. Membangun lokasi percontohan smart farming terpadu yang mengintegrasikan teknologi dari hulu ke hilir (budidaya presisi, pascapanen modern, hingga pemasaran digital).
3. Peningkatan kapasitas SDM dan literasi digital petani melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan penggunaan aplikasi pertanian, sistem monitoring berbasis sensor, serta pemasaran digital.
4. Penguatan kemitraan dengan sektor swasta dan startup agritech guna mempercepat transfer teknologi serta membuka akses pembiayaan atau skema penggunaan teknologi berbasis sewa (*sharing economy*).

Sasaran Kegiatan 3	• **Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima**

Sasaran kinerja ketiga yaitu Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan

Prima. Indikator dari sasaran kinerja tersebut adalah Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nilai pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM menjadi salah satu indikator kinerja pada seluruh satker BRMP, sehingga pada periode Renstra 2025 – 2029 di seluruh satker lingkup BRMP mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) "Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM", yang harus dilakukan pengukuran setiap tahunnya.

Penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM tahun 2025 telah dilakukan secara silang oleh Tim Assesor lingkup BRMP. Hasil penilaian pembangunan Zona Integritas (ZI) tahun 2025 Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura dideskripsikan pada Tabel 6, nilai ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 1550/Kpts/PW.410/12/2025 (Lampiran 6). Capaian realisasi nilai ZI PPMP Hortikultura seluruhnya melebihi target dengan rerata capaian 104,93% dengan kategori sangat berhasil.

Tabel 6. Capaian Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Lingkup PPMP Hortikultura

Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM	Target	Realisasi	%
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	86,00	88,17	102,52
Balai Pengujian dan Perakitan Tanaman Sayuran	87,62	88,02	100,46
Balai Pengujian dan Perakitan Tanaman Buah Tropika	82	88,21	107,57
Balai Pengujian dan Perakitan Tanaman Hias	82	87,33	106,50
Balai Pengujian dan Perakitan Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	82	88,25	107,62

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 mengenai unsur penilaian ZI menuju WBK/WBBM, di mana terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil, terdapat enam komponen pengungkit dan dua komponen hasil (Gambar 2).



Gambar 2. Komponen unsur penilaian ZI PPMP Hortikultura

Dalam pelaksanaannya, PPMP Hortikultura telah melakukan langkah-langkah dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Pembangunan ZI-WBK/WBBM.
2. Menyusun Rencana Pembangunan ZI-WBK/WBBM.
3. Komitmen bersama Rencana Pembangunan ZI-WBK/WBBM.
4. Pelaksanaan Pembangunan ZI-WBK/WBBM.
5. Pemantauan rutin pelaksanaan pembangunan ZI-WBK/WBBM.
6. Evaluasi Pembangunan ZI-WBK/WBBM (Triwulanan).
7. Tindaklanjut perbaikan hasil evaluasi.

Perhitungan nilai ZI ini berdasarkan perolehan nilai dari komponen pengungkit dan komponen hasil sebagai berikut yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Komponen Pengungkit dalam Penilaian Zona Integritas PPMP Hortikultura

No	Komponen/Sub Komponen Indikator proses	Bobot	Nilai
1.	Manajemen Perubahan	4,00	3,81
2.	Penataan Tata laksana	3,50	3,06

No	Komponen/Sub Komponen Indikator proses	Bobot	Nilai
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	5,00	4,61
4.	Penguatan Akuntabilitas	5,00	4,58
5.	Penguatan Pengawasan	7,50	6,22
6.	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	5,00	4,18
	TOTAL PEMENUHAN	**30,0**	**26,47**
1.	Manajemen Perubahan	4,00	4,00
2.	Penataan Tata laksana	3,50	3,00
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	5,00	4,70
4.	Penguatan Akuntabilitas	5,00	3,50
5.	Penguatan Pengawasan	7,50	7,50
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	5,00
	TOTAL REFORM	30,00	27,70
	TOTAL PENGUNGKIT	**60,00**	**54,17**
I.	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22,50	18,38
II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50	15,62
	TOTAL HASIL	**40,00**	**34,00**
	Nilai ZI	**100,0**	**88,17**

Adapun capaian Nilai Pembangunan ZI menuju WBK WBBM pada PPMP Hortikultura selama 3 (tiga) tahun disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Perbandingan capaian Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada PPMP Hortikultura tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	%
2023	85,00	86,77	102,08
2024	85,50	89,40	104,56
2025	86,00	88,17	102,52

Berdasarkan tabel 8, capaian indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada PPMP Hortikultura menunjukkan kinerja yang sangat baik. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 85,00 dan meningkat pada tahun 2024 sebesar 85,50. Realisasi pada tahun 2023 dan 2024 melebih target yaitu 86,77 (102,08%) pada tahun 2023 dan 89,40 (104,56%) pada tahun 2024. Pada tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar 86,00 dengan realisasi 88,17 (102,52%). Meskipun capaian pada 2025 mengalami penurunan, namun secara keseluruhan, tren capaian indikator kinerja selama periode 2023–2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan Zona Integritas PPMP Hortikultura berada pada kategori Sangat Berhasil, serta mencerminkan komitmen berkelanjutan PPMP Hortikultura dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola organisasi.

Perbandingan capaian indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada PPMP Hortikultura terhadap target draft Renstra 2025-2029 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Perbandingan realisasi Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada PPMP Hortikultura tahun 2025 dengan Renstra

Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
Target Renstra (nilai)	86,00	88,17	88,50	88,83	89,10
Realisasi Kinerja (nilai)	88,17	-	-	-	-
Capaian (%)	102,52	-	-	-	-

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM serta alternatif solusi

Keberhasilan pencapaian kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Komitmen seluruh pegawai PPMP Hortikultura dalam pelaksanaan pembangunan ZI. Adanya keteladanan pimpinan, internalisasi budaya integritas, serta keterlibatan aktif seluruh pegawai dalam pelaksanaan program ZI mendorong implementasi reformasi birokrasi yang lebih nyata.
2. Koordinasi dan pengawalan rutin antar bagian.
3. Tindak lanjut dari penilaian ZI tahun sebelumnya.
4. Perbaikan tata kelola dan dokumentasi yang lebih tertib. Kelengkapan dokumen dukung, SOP yang diperbarui, serta tertib administrasi menjadi faktor penting dalam pencapaian nilai Zona Integritas PPMP Hortikultura.

Disisi lain, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ZI pada PPMP Hortikultura antara lain:

1. Adanya perubahan nomenklatur di pertengahan tahun 2025, sehingga perlu menyesuaikan ulang dokumen-dokumen pendukung terutama terkait perencanaan dan pengendalian yang membutuhkan sinkronisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
2. Jumlah, kapasitas, serta kapabilitas SDM yang belum maksimal untuk mendukung pelaksanaan ZI.

Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, PPMP Hortikultura telah melakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain:

1. Melakukan penyesuaian SK, SOP, dan dokumen pendukung lainnya.
2. Penegakan disiplin dan pengembangan kompetensi pegawai, serta penyusunan standar pelayanan.

3. Melaksanakan rapat ZI secara rutin setiap triwulan.

Sasaran Kegiatan 4	•Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura memiliki target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 92,00 dengan nilai capaian sebesar 99,79 sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian dari indikator ini adalah 108,46% dengan kategori sangat berhasil. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup PPMP Hortikultura (berdasarkan PMK)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Target	Realisasi	%
Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	92,00	99,79	108,46
BPP Tanaman Sayuran	92,00	97,98	106,50
BPP Tanaman Buah Tropika	92,20	97,74	106,00
BPP Tanaman Hias	92,00	97,72	106,22
BPP Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	92,50	99,70	107,78

Berdasarkan dashboard Monev Kemenkeu (Gambar 3), pada 31 Desember 2025 PPMP Hortikultura memiliki tingkat pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 99,79. Pencapaian kinerja tersebut didasarkan pada beberapa variabel aspek implementasi yaitu revisi DIPA 10%, Deviasi Halaman III DIPA 15%, Penyerapan Anggaran 20%, Pengelolaan UP dan TUP 10%, dan capaian output 25%.

Kementerian Keuangan

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Periode s.d. Desember

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Satuan Kerja	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	Desember	023	018	025227 PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA	Nilai	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	98,31	100,00	79,83	80%	0.00	99.79
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	15,00	20,00	0,00	0,00	9,83	25,00				
					Nilai Aspek	100.00		99.16				100.00				

Gambar 3. Dashboard Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPMP Hortikultura TA 2025

Nilai IKPA menjadi parameter atas penilaian kinerja penganngaran berbasis kinerja dalam satu tahun anggaran. Perbandingan capaian antar tahun periode 2023-2025 dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Perbandingan capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPMP Hortikultura TA 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	%
2023	-	92,19	-
2024	92,19	98,55	106,90
2025	92,00	99,79	108,46

Berdasarkan tabel 11, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPMP Hortikultura menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada tahun 2023, Indikator Kinerja yang ditetapkan adalah Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura. Pada tahun 2023, target Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura adalah 86,00 dengan realisasi 89,04 (103,53%) dengan tren sangat berhasil. Meskipun pada tahun 2023 tidak terdapat target nilai IKPA, namun berhasil mendapatkan nilai IKPA sebesar 92,19. Pada tahun 2024 indikator kinerja disesuaikan menjadi Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran dengan target 92,19 dan realisasi sebesar 98,55 (106,90%). Pada tahun 2025, target Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran PPMP Hortikultura sebesar 92,00 dengan realisasi 99,79 (108,46%). Meskipun tidak bisa dibandingkan capaian selama 3 tahun, namun dari capaian 2 tahun PPMP Hortikultura mengalami kenaikan capaian dan tren capaian indikator kinerja selama periode 2024–2025 menunjukkan bahwa Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PPMP Hortikultura berada pada kategori Sangat Berhasil.
Perbandingan capaian indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada PPMP Hortikultura terhadap target draft Renstra 2025-2029 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Perbandingan realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada PPMP Hortikultura tahun 2025 dengan Renstra

Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
Target Renstra (nilai)	92,00	99,79	99,85	99,87	99,89
Realisasi Kinerja (nilai)	99,79	-	-	-	-
Capaian (%)	108,46	-	-	-	-

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran serta alternatif solusi

Keberhasilan pencapaian kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran PPMP Hortikultura dipengaruhi beberapa hal, antara lain:

1. Koordinasi intensif antara perencana, PPK, PPSPM, bendahara, dan pengelola kegiatan terkait capaian output dan realisasi anggaran.
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui Pelatihan teknis terkait aplikasi keuangan, regulasi terbaru, serta tata cara pertanggungjawaban anggaran.
3. Melakukan pengisian aplikasi SAKTI secara tertib.

Di sisi lain, terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Adanya pemblokiran anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan kurang maksimal.
2. Penentuan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang tinggi sehingga membutuhkan usaha yang lebih untuk memenuhi RPD.

Antisipasi yang dilakukan untuk memitigasi hambatan dalam pelaksanaan ke depan antara lain:

1. Melaksanakan rapat koordinasi setiap awal dan akhir bulan antara perencana, PPK, PPSPM, bendahara, dan pengelola kegiatan guna menyelesaikan kendala administrasi dan teknis secara cepat.
2. Fokus terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan melaksanakan akselerasi kegiatan agar deviasi tidak melebihi 5%.
3. Penerapan sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk mengidentifikasi kegiatan berisiko rendah serapan atau terlambat pelaksanaan agar dapat segera dilakukan percepatan atau penyesuaian strategi.

3.1.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dalam regulasi tersebut, Standar Biaya Keluaran (SBK) digunakan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran. SBK adalah indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan satu volume keluaran dan menjadi bagian dari Standar Biaya, yang meliputi Standar Biaya Masukan dan Standar Struktur Biaya (SSB).

Salah satu prinsip utama yang ditetapkan dalam PMK tersebut adalah efisiensi penggunaan anggaran, yang bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara tertib, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Efisiensi kinerja diukur secara otomatis melalui aplikasi SMART pada https://monev.kemenkeu.go.id/. Nilai efisiensi PPMP Hortikultura pada tahun 2025 sebesar 100% (Gambar 4).



Sumber: Aplikasi Monev Kemenkeu, Kementerian Keuangan

Gambar 4. Nilai efisiensi SBK tahun 2025

Berdasarkan hasil monitoring penggunaan SBK, terdapat 3 RO PPMP Hortikultura yang telah menggunakan SBKU yang disajikan pada tabel 13.

Tabel 13. Monitoring penggunaan SBK PPMP Hortikultura Tahun 2025

No	RO	Indeks SBK (Rp)	Realisasi (Rp)	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan Penggunaan SBK
1	2	3	4	5	6=4/5	7
1	Layanan BMN (Layanan)	480.000.000	7.954.700	1	7.954.700	Ya
2	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	458.000.000	19.217.000	1	19.217.000	Ya
3	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	24.511.500	1	24.511.500	Ya

Sumber: Aplikasi Monev Kemenkeu, Kementerian Keuangan (diolah)

Berdasarkan hasil monitoring penggunaan SBK, semua BPP lingkup PPMP Hortikultura juga memperoleh nilai efisiensi sebesar 100%. Adapun rincian nilai efisiensi BPP lingkup PPMP Hortikultura disajikan pada tabel 14.

Tabel 14. Nilai Efisiensi BPP lingkup PPMP Hortikultura

No	Satker	Nilai Efisiensi (%)
1	BPP Tanaman Sayuran	100%
2	BPP Tanaman Buah Tropika	100%
3	BPP Tanaman Hias	100%
4	BPP Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa BPP lingkup PPMP Hortikultura sudah efisien. Nilai Efisiensi tersebut didukung oleh 3 (tiga) RO SBK yakni 1) RO Layanan BMN; 2) RO Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi; dan 3) RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi. Pada tahun 2025, alokasi anggaran untuk ketiga RO SBK tersebut sangat jauh di bawah SBK namun kegiatan dapat berjalan dengan baik karena adanya dukungan dari pimpinan dan kontribusi dari semua bagian di unit kerja.

3.1.4. Capaian Kinerja Lainnya

A. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Audit Eksternal

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura telah melangsungkan Audit Eksternal Resertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 oleh PT. Enhaii Mandiri dikarenakan adanya perubahan nomenklatur dari Pusat Standarisasi Instrumen Hortikultura menjadi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura. ISO 9001:2015 adalah sistem manajemen mutu yang penerapannya di organisasi untuk meningkatkan produk dan layanan, sehingga akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi. Pada pelaksanaan audit eksternal tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian pada implementasi ISO 9001:2015 di Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura sehingga ditetapkan untuk memperoleh sertifikat ISO 9001:2015.


PT. ENHAII MANDIRI 186

ENHAII Mandiri 186

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
PT. ENHAII MANDIRI 186

SERTIFIKAT

Dengan ini menyatakan bahwa

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Kampus Penelitian Pertanian
Jl. Tentara Pelajar No. 3C, RT. 01/RW.15, Kel. Menteng, Kec. Bogor Barat
Bogor 16111 - Indonesia

Terbukti bahwa persyaratan sesuai

SNI ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Mutu

telah dipenuhi untuk ruang lingkup :

Layanan Manajemen dan Administrasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
(EA Code: 36 Nace Code: 84.11)

Nomor Sertifikat : 25120002-SMM
Masa berlaku sertifikat :
Diterbitkan tanggal : 30 Desember 2025
Berakhir tanggal : 29 Desember 2028

Yenie Simha, SE, MM, Direktur Utama

IAF

KAN

Gambar 5. Sertifikat ISO 9001:2015 PPMP Hortikultura

PPMP Hortikultura menjadi Tuan Rumah *The 19th Steering Committee Meeting of The ASEAN-AVRDC Regional Network for Vegetable Research*

and Development (AARNET)* yang diselenggarakan *World Vegetable Center

Indonesia melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Hortikultura menjadi tuan rumah *The 19th Steering Committee Meeting of The ASEAN-AVRDC Regional Network for Vegetable Research and Development (AARNET)* yang diselenggarakan *World Vegetable Center* secara hybrid di Ruang Rapat Merah Delima, Kantor PPMP Hortikultura, Bogor. Pertemuan tahunan ini bertujuan memperkuat kolaborasi internasional dalam penelitian dan pengembangan sayuran di kawasan ASEAN. Adapun delegasi yang berpartisipasi kali ini terdiri dari tujuh negara ASEAN meliputi Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, serta perwakilan dari *World Vegetable Center regional*.

Kepala BRMP, Prof. Dr. Ir. Fadjri Djufry, M.Si., selaku tuan rumah membuka acara dengan menyampaikan sambutan selamat datang kepada seluruh delegasi. Chairperson pertemuan Ms. Poh Bee Ling dan perwakilan *World Vegetable Center* Ms. Delphine Larrousse Cambe menyampaikan apresiasi atas keramahan Indonesia dalam menjadi tuan rumah pertemuan ini. Pertemuan ini membahas perkembangan penelitian tanaman sayuran di kawasan ASEAN dan berbagi update riset dari masing-masing negara anggota.

Kepala PPMP Hortikultura Husnain, M.P., M.Sc., Ph.D. mempresentasikan pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagai upaya Kementerian Pertanian untuk memperkuat penelitian pertanian nasional. Di bawah BRMP terdapat Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura yang menangani tanaman sayuran, tanaman buah tropika, tanaman hias, serta tanaman jeruk dan buah subtropika. Adanya BRMP diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar sayuran regional dan global sekaligus secara langsung mendukung petani kecil dengan peralatan dan pengetahuan yang lebih baik. Dipaparkan juga mengenai kondisi terkini produksi dan konsumsi sayuran, tantangan dalam produksi sayuran, serta pengembangan varietas unggul untuk beberapa tanaman sayuran.

Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan AARNET ke-19 ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kolaborasi regional yang difasilitasi *World Vegetable Center* untuk kemajuan sektor hortikultura khususnya sayuran di kawasan ASEAN.



Gambar 6. Indonesia sebagai Tuan Rumah *19th AARNET Steering Committee Meeting*

PPMP Hortikultura Raih Predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementan 2025

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan agenda tahunan Kementerian Pertanian yang bertujuan untuk mengevaluasi sekaligus memberikan apresiasi atas kinerja pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada masing-masing unit kerja. PPMP Hortikultura berhasil meraih predikat "Informatif". Predikat ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja PPMP Hortikultura dalam mengelola informasi publik secara transparan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Capaian ini mencerminkan konsistensi PPMP Hortikultura dalam menjalankan fungsi kehumasan dan PPID, termasuk melalui pemanfaatan media digital, publikasi kegiatan, serta penyediaan informasi program dan layanan kepada publik.

Kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik juga dirangkaikan dengan penyampaian arahan dan kebijakan pimpinan terkait penguatan komunikasi publik dan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan publik serta mendukung keberhasilan pelaksanaan program pembangunan pertanian nasional. Melalui partisipasi dan capaian tersebut, PPMP Hortikultura menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan kehumasan dan layanan informasi publik, memperkuat peran PPID, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Pertanian.



Gambar 7. PPMP Hortikultura Raih Predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementan 2025

PPMP Hortikultura Meraih Penghargaan Satker dengan Nilai IKPA terbaik dan Realisasi Penggunaan UP KKP Melebihi Target

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura pada Bulan Agustus 2025 mendapatkan piagam penghargaan dari Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor. Penghargaan tersebut diberikan atas capaian kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja lingkup KPPN Bogor periode Semester I Tahun 2025. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian mendapatkan dua kategori penghargaan yaitu kategori satker dengan nilai IKPA terbaik (100) pada 5 indikator dengan bobot 80% dan kategori satker dengan realisasi penggunaan UP KKP melebihi target persentase UP KKP disetahunkan.



Gambar 8. Piagam penghargaan dari KPPN Bogor

Program Strategis Kementerian Pertanian

Kebijakan pemerintah dalam mendukung swasembada pangan mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan produksi, pemanfaatan teknologi, stabilisasi harga, hingga perlindungan terhadap petani. Dengan sinergi antara

pemerintah, petani, akademisi, dan sektor swasta, diharapkan Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.

Kegiatan swasembada pangan terdiri dari:

- Luas tambah tanam (LTT) yaitu pengawalan kegiatan pertanaman padi regular
- Optimasi lahan (Oplah) yaitu peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas padi di lahan rawa dan non rawa
- Padi gogo yaitu penanaman padi gogo di lahan kering, tumpang sisip, maupun tegalan
- Cetak sawah Rakyat (CSR) yaitu pembukaan lahan sawah baru (ekstensifikasi) dan Otimalisasi lahan existing (intensifikasi)

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura mendapatkan tugas sebagai penanggung jawab swasembada pangan berdasarkan Kepmentan No 109 tahun 2025, yang menugaskan Ketua kelompok Program dan Evaluasi sebagai penangung jawab di Kabupaten Ende dan Ketua Kelompok Kerjasama dan Penyebarluasan sebagai penanggung jawab di Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur pada bulan Mei 2025. Kemudian pada bulan Juni 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 458 tahun 2025, Kepala PPMP Hortikultura mendapat tugas untuk mengawal program swasembada pangan di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Berikut data target dan capai program swasembada pangan pada tabel 15.

Tabel 15. Target dan Capaian Kegiatan Swasembada Pangan TA.2025

Kegiatan Swasembada Pangan	Kab. Ende, NTT		Kab. Nagekeo, NTT		Kab. Pidie, Aceh	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Luas Tambah Tanam (Ha)	10.233	7771,35	12.096	10.149	56.552	40.763,27
Optimasi Lahan (Ha)	1.413	1.500	1.000	3.700	1.000	863,53
Padi Gogo (Ha)	264	685,6	375	612,78	1.301	471
Brigade Pangan (BP)	7	7	5	18	5	5

- Capaian LTT padi reguler dari bulan Januari hingga Desember 2025 di Kabupaten Ende sebesar 7.771,35 Hektar. Jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 10.233 Hektar, maka realisasinya hanya mencapai 75,94%. Namun, jika dibandingkan dengan kesanggupan atau data CPCL yang diajukan oleh Kabupaten Ende sebesar 6.647 Hektar, realisasi tersebut sudah melebihi target (116,91%). Tidak tercapainya realisasi LTT padi regular sesuai target Kementerian Pertanian disebabkan oleh: Curah hujan sangat rendah pada bulan Agustus – Oktober, pelaksanaan kontrak

konstruksi kegiatan optimasi lahan tertunda dari target seharusnya yaitu bulan Oktober, penggunaan varietas padi yang berumur panjang (Varietas Bengawan), dan keterbatasan jumlah alsintan panen (combine harvester).

- Capaian LTT padi reguler dari bulan Januari hingga Desember 2025 di Kabupaten Nagekeo sebesar 10.149 Ha dari target sebesar 12.096 Ha. Hal tersebut dikarenakan Target LTT pusat setiap bulan dinaikkan dari kesanggupan daerah sehingga harus terjadi penyesuaian, k naikan target tidak sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan LBS di daerah, laporan LTT dari kabupaten masih sering terlambat, Laporan LTT ada tiga, yaitu yang dilaporkan di LTT TP, LTT e pusluh dan LTT Korluh sehingga seringkali datanya tidak sesuai diantara laporan tersebut, pemetaan laporan LTT setiap bulan tingkat kecamatan dan desa belum tepat waktu.
- Capaian LTT Kabupaten Pidie sebesar 40.763,27 Ha atau sebesar 72,08% dari target 56.552 Ha per tanggal 30 Desember. Hal tersebut dikarenakan oleh: Debit air rendah (Padang Tiji, Batee, Pidie, Glumpang Baro, Indrajaya), perbaikan jaringan irigasi oleh BWS membuat suplai air terhenti di beberapa wilayah (Simpang Tiga, Sakti, Mutiara, Mutiara Timur, Sebagian Grong-Grong), perubahan musim hujan sehingga persemaian banyak yang mati dan dilakukan ulang, dan keyakinan bahwa sisanya akan tergeser ke Desember–Januari, sehingga target tahunan tetap dapat dikejar.
- Capaian luas tanam padi gogo Kabupaten Pidie sebesar 471 Ha jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 1.301 Ha maka realisasinya hanya mencapai 36,2%. Namun, jika dibandingkan dengan target CPCL sebesar 426 Ha realisasi tersebut sudah melebihi target dan terdapat kelebihan seluas 45 Ha yang berasal dari swadaya bukan bantuan.
- Progres kegiatan Optimasi Lahan Kabupaten Pidie dari target 1000 Ha telah selesai pengolahan lahan dan realisasi keuangan mencapai 100% sebanyak 8 kecamatan dengan luasan sebesar 220,85 Ha. Sedangkan yang realiasi keuangan telah mencapai 100% tetapi belum selesai olah lahan sebanyak 3 kecamatan dengan realisasi fisik pengolahan lahan berkisar 75,22-95,59%. Total luas lahan yang sudah diolah sebanyak 863,53 Ha. Sekitar bulan November ada musibah banjir yang melanda Provinsi Aceh, lahan di 4 Kecamatan Kabupaten Pidie yaitu Kembang Tanjong, Mutiara Timur, Batee, dan Tiro terdampak banjir dengan kategori ringan-berat.



Gambar 9. Kegiatan Swasembada Pangan Kabupaten Ende



Gambar 10. Kegiatan Swasembada Pangan di Kabupaten Nagekeo



Gambar 11. Kegiatan Swasembada Pangan di Kabupaten Pidie

Penghargaan Kepala Bagian Terbaik

Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura mendapatkan penghargaan sebagai Kepala Bagian Terbaik Tahun 2025 Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, yaitu diberikan kepada Bapak Eman Sulaeman, S.P., M.Si. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Kepala Bagian Tata Usaha yang mendedikasikan dirinya bekerja sepenuh hati dan totalitas.



Gambar 12. Penghargaan Kepala Bagian Terbaik Lingkup BRMP

Kegiatan Produksi Benih Sumber Bawang Putih

Produksi benih sumber bawang putih merupakan salah satu kegiatan strategis yang diamanatkan Menteri Pertanian kepada BRMP melalui Keputusan Menteri Pertanian No 241 Tahun 2025 tentang Tim Akselerasi Perluasan Produksi Kedelai, Bawang Putih, dan Gandum. Produksi lingkup BRMP tahun 2025 ditargetkan sebanyak 200 ton yang diampu oleh BRMP Sayuran, BRMP Sumatra Utara, BRMP Jawa Tengah, BRMP Jawa Timur, dan BRMP NTB. Produksi benih bawang putih yang diampu oleh BRMP Sayuran dilaksanakan di lima lokasi, yaitu Lembang, KP Berastagi, Cipanas, Batu, dan KP Gurgur. Kegiatan ini dilakukan dengan metode pemurnian varietas menggunakan benih kelas Sebar (ES). Pada akhir tahun 2025, produksi benih sumber bawang putih tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Kondisi tersebut dikarenakan:

1. Proses pengusulan anggaran untuk pembiayaan produksi benih bawang putih lingkup BRMP sudah dilaksanakan sejak Mei tahun 2025. BRMP pun telah menindaklanjuti semua catatan hasil review dalam setiap pembahasan anggaran dengan DJA maupun Bappenas;
2. BPP Tanaman Sayuran telah membuat timeline kegiatan dengan penanaman optimal pada bulan Juli, ditargetkan pada bulan Oktober telah dapat dipanen dan kemudian diproses menjadi benih dengan target produktivitas 4 ton/hektar.
3. Pada pelaksanaannya, pembahasan anggaran untuk produksi benih komoditas strategis kedelai, gandum, dan bawang putih BRMP memerlukan waktu yang lebih panjang. Hal itu terkait dengan perlunya waktu untuk menindaklanjuti atas catatan hasil review pertemuan *Trilateral Meeting* dengan Bappenas dan DJA yang dilaksanakan pada 27 Mei 2025. Catatan tersebut antara lain harus ada proses bisnis tata kelola perbenihan serta rencana okupasi hasil produksi benih. PPMP Hortikultura telah menindaklanjuti catatan terkait keberlanjutan hasil produksi benih sumber berupa Surat Pernyataan Proses Bisnis Tata Kelola Perbenihan Hortikultura yang telah ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Hortikultura, Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, dan diketahui oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian pada tanggal 4 Juli 2025. Pola okupasi hasil produksi juga telah disusun oleh PPMP Hortikultura. Keberlanjutan hasil produksi benih sumber oleh BRMP ditunjukkan dengan melibatkan Asosiasi Benih Bawang Putih (ASBATI) binaan Direktorat Jenderal Hortikultura yang telah berkomitmen menyepakati untuk melakukan penyerapan benih sumber produksi BRMP oleh para penangkar anggota ASBATI sebesar minimal 50%. Penandatanganan kesepakatan okupasi dilakukan oleh Kepala PPMP Hortikultura dan Wakil Ketua ASBATI, Ir. Mochamad Toha pada Senin, 21 Juli 2025.
4. PPMP Hortikultura juga telah melakukan koordinasi dengan Pejabat Fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT) di lingkungan Direktorat Perbenihan Hortikultura yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan mutu benih

untuk mendapatkan penjelasan terkait persyaratan kelas benih sumber yang mengacu pada Permentan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura pada Selasa, 22 Juli 2025. Hasil koordinasi menyatakan bahwa BRMP dapat melakukan produksi benih sumber kelas benih pokok (BP) melalui pemurnian varietas dengan benih yang berasal dari benih bermutu minimal kelas Benih Sebar (BR).

5. Proses pembahasan anggaran yang cukup panjang dan perlunya waktu untuk menindaklanjuti catatan hasil penelaahan untuk 3 komoditas (bawang putih, kedelai, dan gandum), menyebabkan surat usulan revisi anggaran DIPA Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian baru dapat disampaikan ke DJA pada tanggal 21 Agustus 2025 dengan nomor Surat B-1284/RC.110/H/08/2025. Pengesahan terhadap usulan revisi DIPA tersebut disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan pada tanggal 2 September 2025 melalui surat Direktur Jenderal Anggaran NomorS-761/AG/AG.3/2025 tentang Pengesahan Revisi Anggaran TA 2025 Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian (Revisi Ke-6).
6. Kondisi tersebut menyebabkan proses produksi benih sumber bawang putih oleh BRMP mundur dari jadwal produksi optimal yaitu penanaman bulan Juni/Juli dan panen pada bulan Oktober, tetapi penanaman dilaksanakan pada bulan Oktober dan panen pada bulan Februari 2026. Pada bulan Desember ini masih pada tahap pemeliharaan tanaman sesuai penyesuaian timeline kegiatan.
7. Dengan demikian output kegiatan produksi benih sumber bawang putih oleh BRMP Sayuran pada TA 2025 baru dapat berupa calon benih bawang putih yang masih berada pada tahap pemeliharaan tanaman. Pada TA 2026 akan dilanjutkan dengan kegiatan panen dan pascapanen termasuk proses penyimpanan umbi segar hasil panen menjadi benih untuk menunggu masa dormansi selama 4-5 bulan. Selama masa dormansi di awal tahun 2026, terdapat kegiatan pengeringan calon benih, pembersihan, pemisahan dan pengikatan, penyimpanan benih, sortasi, dan sertifikasi di gudang yang perlu dilakukan. Produksi benih sumber akan selesai pada bulan Juni-Juli 2026.
8. Estimasi hasil produksi benih sumber bawang putih akan tercapai 52 unit (ton) berdasarkan pengamatan kondisi pertumbuhan tanaman di lapangan.



Gambar 13. Pemeliharaan Tanaman Bawang Putih

Perencanaan Pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Komoditas Hortikultura

Tahun 2025 berdasarkan SK BSN NOMOR 8/KEP/BSN/1/2025 ditetapkan sebanyak delapan PNPS dengan judul :

1. Produksi Planlet Kentang Kelas Benih Penjenis (Baru)
2. Benih krisan kelas benih sebar (Baru)
3. Markisa (Revisi SNI 6947:2009)
4. Lengkeng (Revisi SNI 8025:2014)
5. Benih kentang (*Solanum tuberosum* L.) stek berakar kelas benih dasar (Baru)
6. Jeruk Siam (Baru)
7. Manggis (Revisi SNI 3211:2009)
8. Daun potong pakis *leather leaf (*Revisi SNI 7852:2013)

Penetapan Ruang Lingkup Pengembangan SNI

- Standar produk segar: Mutu fisik, ukuran, tingkat kematangan, bebas hama/penyakit.
- Standar benih/bibit: Mutu genetika, kemurnian varietas, daya tumbuh.
- Standar pascapanen: Penanganan, pengemasan, penyimpanan, dan transportasi.
- Standar sistem produksi: Pertanian organik, GAP (Good Agricultural Practices), GHP (Good Handling Practices).
- Standar keamanan pangan: Residu pestisida, logam berat, cemaran mikroba.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 245/KEP/BSN/7/2025 tentang Pembentukan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 65-15 Hortikultura mempunyai ruang lingkup mengembangkan standar komoditas sayuran, buah dan tanaman hias, dalam hal terminologi, benih, budidaya, pengambilan sampel, metoda pengujian dan analisis, spesifikasi produk, produk turunan berbasis buah, sayur dan tanaman hias, serta persyaratan penyimpanan, pengemasan dan pengangkutan.

Tahun 2025 Sekretariat Komtek 65-15 Hortikultura menyelenggarakan rapat teknis pembahasan 4 RSNI dari 8 RSNI yang telah ditetapkan oleh BSN. Pembatalan 4 RSNI karena keterbatasan alokasi anggaran untuk kegiatan pembahasan PNPS serta dalam rangka efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran tahun 2025.

Pelaksanaan Rapat Teknis Kesatu

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura selaku sekretariat Komtek 65-15 Hortikultura telah melaksanakan Rapat Teknis 1 pada tanggal 30 September 2025 bertempat di Ruang rapat Krisan PPMP Hortikultura. Rapat dilaksanakan secara *hybrid*, dibuka oleh Ketua Komtek 65-15 Hortikultura Husnain, MP, M.Sc, Ph.D dilanjutkan dengan Sambutan dari Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura. Ratek dihadiri oleh Wakil Ketua Komtek Prof. Sobir, serta anggota komtek lainnya. Perwakilan BSN hadir yaitu Ibu Bety Wahyu Hapsari selaku PIC Komtek 65-15 Hortikultura dan Ibu Sefty. Turut hadir Ketua dan Tim Konseptor dari masing-masing RSNI baik secara online maupun offline. Paparan

RSNI Daun potong pakis *Leather Leaf*, RSNI Benih kentang (*Solanum tuberosum* L.) stek berakar kelas benih dasar, RSNI Manggis, dan RSNI Jeruk siam disampaikan oleh perwakilan dari Tim Konseptor masing-masing. Beberapa hal yang disampaikan:

Hasil Ratek Kesatu 4 draft RSNI yaitu :

1. Keempat RSNI 1 yang dibahas hari ini masih perlu diperbaiki sesuai saran dan masukan yang disampaikan dalam rapat teknis 1.
2. Metode penulisan RSNI 1 Benih kentang (*Solanum tuberosum* L.) stek berakar kelas benih dasar dan RSNI 1 Manggis perlu disesuaikan kembali dengan SNI Kentang dan Durian yang telah diterbitkan tahun 2023 dan 2024.
3. Setelah dilakukan perbaikan Draft RSNI 1 akan dibahas kembali dalam agenda rapat teknis 2.
4. Seluruh peserta telah berpartisipasi aktif dalam mengawal Rapat Teknis 1 Komtek 65-15 Hortikultura Tahun 2025.

BRMP akan berkomitmen dengan seluruh kegiatan penyusunan RSNI dengan tetap megawal proses penyusunan SNI namun tetap dengan memperhatikan skala prioritas.



Gambar 14. Pelaksanaan Rapat Teknis Kesatu

Pelaksanaan Rapat Teknis Kedua

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura selaku sekretariat Komtek 65-15 Hortikultura telah melaksanakan Rapat Teknis (Ratek) 2 secara hybrid, yakni secara luring di Kantor Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura, Bogor, serta daring melalui Zoom Meeting pada tanggal 15 Oktober 2025. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari proses perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) tahun 2025. Rapat dihadiri oleh Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang juga menjabat sebagai Ketua Komtek 65-15 Hortikultura, Husnain, M.P., M.Sc., Ph.D., Kepala PPMP Hortikultura, Dr. Inti Pertiwi Nashawai, S.P., M.P., serta para Kepala Balai lingkup PPMP Hortikultura. Turut hadir Wakil Ketua Komtek 65-15 Hortikultura, Prof. Sobir, para anggota Komtek 65-15 Hortikultura, para konseptor lingkup PPMP Hortikultura, dan perwakilan Badan Standardisasi Nasional (BSN) selaku PIC Komtek 65-15 Hortikultura.

Pada Ratek 2 ini dibahas empat RSNI, yakni RSNI Daun potong pakis leather leaf, RSNI Benih kentang (Solanum tuberosum L.) stek berakar kelas benih dasar, RSNI Manggis, dan RSNI Jeruk siam. Selain itu, masih terdapat tujuh SNI yang perlu dikaji ulang pada tahun 2025 serta pengusulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) tahun 2025 yang harus disampaikan kepada BSN sebelum 31 Oktober 2025. Di akhir rapat, Kepala Pusat menegaskan bahwa meskipun terjadi perubahan tugas dan fungsi kelembagaan, penyusunan rancangan standar tetap menjadi bagian penting dari pelaksanaan peran lembaga. Namun demikian, penyusunan tersebut perlu dilakukan dengan penyesuaian skala prioritas agar sejalan dengan arah kelembagaan yang baru.



Gambar 15. Pelaksanaan Rapat Teknis Kedua

Konsultasi Publik dan Konsensus

Draf dibuka untuk komentar publik. Diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memperoleh konsensus nasional. Revisi berdasarkan masukan teknis dan praktis.

Sekretariat Komite Teknis 65-15 Hortikultura menggelar Rapat Konsensus (Rakon) pada tanggal 28 Oktober 2025, bertempat di Ruang Rapat Merah Delima, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura (PPMP Hortikultura), Bogor. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari proses perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) tahun 2025. Rakon dihadiri oleh anggota Komtek 65-15 Hortikultura, Tim Konseptor, dan perwakilan dari Badan Standardisasi Nasional (BSN). Rakon dihadiri secara langsung oleh Sekretaris Komtek Astri Windia Wulandari, serta anggota Komtek Dian Kurniasih, Rima Setiani, Abdul Hamid, Rizal Fahreza, Muhammad Maulud, Andreas Susanto, dan Rosana Ariani Harahap.

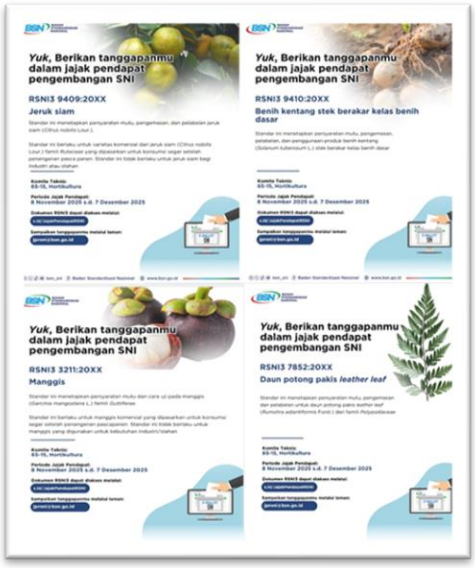
Sementara itu, anggota Komtek yang mengikuti secara daring antara lain Prof. Sobir, Prof. Tarkus Suganda, Slamet Ari Dwi Ratnanto, dan Kiran Rahal.
Rakon dipimpin oleh Sekretaris BRMP selaku Ketua Komtek 65-15 Hortikultura, Husnain, M.P., M.Sc., Ph.D. Pada sambutannya Ketua Komtek menyampaikan apresiasi kepada tim konseptor yang telah menyempurnakan RSNI berdasarkan masukan pada Rapat Teknis kedua sehingga Rakon dapat terlaksana sesuai rencana. Rakon merupakan tahapan penting dalam proses penetapan standar untuk memperoleh konsensus terhadap RSNI3 yang akan diusulkan menjadi SNI. SNI berfungsi sebagai pelindung bagi konsumen dan produsen serta meningkatkan daya saing produk hortikultura.
Dalam rapat ini dibahas empat RSNI yang telah melalui tahapan penyempurnaan, yaitu RSNI Daun Potong Pakis Leather Leaf, RSNI Jeruk Siam, RSNI Benih Kentang (Solanum tuberosum L.) Stek Berakar Kelas Benih Dasar, dan RSNI Manggis. Paparan dari masing-masing rancangan standar disampaikan oleh Tim Konseptor dari balai lingkup PPMP Hortikultura baik secara luring maupun daring, dan dibahas dalam suasana musyawarah yang terbuka. Setelah Rakon, tahapan selanjutnya adalah jajak pendapat terhadap RSNI yang telah disepakati, yaitu proses penyebarluasan dokumen kepada pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mengumpulkan masukan sebelum penetapan menjadi SNI oleh BSN.





Gambar 16. Konsultasi Publik dan Konsensus

Jajak pendapat dilaksanakan dari tanggal 8 November – 7 Desember, draf dibuka untuk komentar publik. Diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memperoleh konsensus nasional. Revisi berdasarkan masukan teknis dan praktis. Apabila tidak terdapat sanggahan dari publik, maka RSNI3 ditetapkan menjadi RASNI oleh BSN.



Gambar 17. Jajak Pendapat

Penetapan dan Penerbitan SNI

SNI ditetapkan oleh BSN, diumumkan secara nasional dan dimasukkan ke dalam sistem peraturan standar. Berikut Keputusan Kepala BSN:

1. Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 742/KEP/BSN/12/2025 tentang Penetapan SNI 3211:2025 Manggis sebagai revisi dari SNI 3211:2009 Manggis;
2. Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 743/KEP/BSN/12/2025 tentang Penetapan SNI 7852:2025 Daun potong pakis *leather leaf* sebagai revisi dari SNI 7852:2013 Daun potong pakis *leather leaf;*
3. Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 744/KEP/BSN/12/2025 tentang Penetapan SNI 9409:2025 Jeruk siam; dan
4. Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 745/KEP/BSN/12/2025 tentang Penetapan SNI 9410:2025 Benih kentang (*solanum tuberosum L.*) stek berakar kelas benih dasar.

Kerja Sama Kemitraan Kompetitif Program Icare (*Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment*)

Kerja Sama Kemitraan Kompetitif Program Icare di PPMP Hortikultura berjudul Implementasi Soil sensor untuk Deteksi Cepat Status Hara pada Produksi Benih Kentang di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang diusulkan oleh Eman Sulaeman, S.P., M.Si. Latar belakang kegiatan ini yaitu Tanaman kentang (*Solanum tuberosum L*) merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mendapat prioritas untuk dikembangkan di Indonesia karena termasuk dalam lima besar sayuran yang diproduksi di Indonesia atau dapat disebut sayuran utama. Kentang

diprioritaskan untuk dikembangkan dan berpotensi untuk dipasarkan di dalam negeri dan diekspor. Ketersediaan benih kentang terkendala oleh produksi yang rendah yaitu 15-17 ton per hektar di bawah potensi hasil varietas kentang yang bisa mencapai 25 sampai 33 ton per hektar.

Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat memiliki luas wilayah yaitu ± 6179,24 ha dengan penggunaan lahan digunakan sebagian besar untuk pertanian. Lahan pertanian dalam meningkatkan hasil pertanian membutuhkan pengelolaan yang baik, tanah sebagai tempat tumbuh tanaman berperan dalam menyediakan nutrisi tanaman. Kesuburan tanah menggambarkan kualitas tanah yang dipakai untuk lahan pertanian. Menjawab tantangan tersebut, Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian, selain memiliki berbagai perangkat uji cepat berdasarkan pewarnaan, juga telah mengembangkan smart soil sensing kit (S3K) versi 1.0. Alat ini dibangun berdasarkan prinsip Near Infra Red (NIR) dan mampu mendeteksi status hara tanah dalam waktu yang cepat dan akurat di lahan kentang. Tujuan kegiatan adalah untuk menyebarkan informasi tentang teknologi soil sensor untuk deteksi cepat status hara pada produksi benih kentang di Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut melalui kegiatan bimtek kepada para petani, penyuluh, wanita tani dan pengurus koperasi putra Cisurupan Berdaya. Hasil bimtek menunjukan tingkat pemahaman petani tentang penerapan teknologi soil sensor kit untuk mendukung perbenihan kentang, literasi teknis para petani terutama petani yang berminat menjadi penangkar benih kentang dan potensi pengembangan bisnis koperasi melalui analisis tanah dengan menggunakan alat soil sensor.



Gambar 18. Implementasi Soil sensor untuk Deteksi Cepat Status Hara pada Produksi Benih Kentang di Kabupaten Garut

Kegiatan *Competitive Grant* ICARE yang dilaksanakan oleh PPMP Hortikultura lainnya berjudul Implementasi Kit Deteksi Cepat Penyakit Huanglongbing (HLB) untuk Mendeteksi Kesehatan Benih dan Tanaman Jeruk di Kabupaten Sambas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran petani jeruk terhadap ancaman serius serangan penyakit HLB yang dapat menyebabkan kerugian petani, sehingga petani mau untuk melakukan berbagai tindakan pencegahan yang direkomendasikan salah satunya menggunakan Kit Deteksi Cepat Penyakit HLB (Kit Depat HLB). Lokasi kegiatan dipilih di Kabupaten Sambas sebagai salah satu sentra produksi jeruk nasional. Identifikasi terhadap serangan penyakit ini di Kabupaten Sambas menunjukkan bahwa 30% tanaman jeruk di Kabupaten Sambas telah terserang HLB.

Keluaran kegiatan ini ialah: (1) Tersedianya satu peta endemisitas penyakit HLB di Kabupaten Sambas sebagai dasar penyusunan model dalam manajemen krisis dan risiko terhadap outbreak HLB; (2) Tersedianya 1.500 unit Kit Depat HLB; (3) Terlaksananya empat kali bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha jeruk lainnya; (4) Teradopsinya Kit Depat HLB pada minimal 5 kelompok tani jeruk; (5) Terlaksananya satu kegiatan inisiasi kerja sama pengembangan Kit Depat HLB antara KPRI Citrus dengan KEP Segarau Bangun Tani; dan (6) Terbentuknya satu unit usaha distribusi Kit Depat HLB pada KEP Segarau Bangun Tani. Semua target keluaran tersebut telah terealisasi pada tahun 2025 dan akan dilanjutkan kegiatannya pada tahun 2026.











Gambar 19. Implementasi Kit Deteksi Cepat Penyakit Huanglongbing (HLB) untuk Mendeteksi Kesehatan Benih dan Tanaman Jeruk di Kabupaten Sambas

B. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran telah menerapkan tiga ISO, yaitu ISO 9001:2015 lingkup perbenihan, ISO 9001:2015 lingkup manajemen dan ISO 17025:2017 untuk Laboratorium Pengujian. Pada tahun 2025 BRMP Sayuran telah melangsungkan Survailen Tahap I untuk Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 lingkup kegiatan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi, pelaksanaan layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman sayuran oleh Mutu International pada 19 – 21 Februari 2025. Dari hasil audit eksternal (survailen tahap II) terdapat satu ketidaksesuaian minor dan 5 peluang peningkatan dan semuanya telah terselesaikan sehingga BRMP Sayuran dapat mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 untuk lingkup kegiatan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi, pelaksanaan layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian standar instrumen tanaman sayuran hingga 31 Januari 2027.


mutu
international

CERTIFICATE
OF CONFORMITY

BALAI PENGUJIAN STANDAR
INSTRUMEN TANAMAN SAYURAN

SNI ISO 9001:2015

KAN
Komite Akreditasi Nasional

Gambar 20. Sertifikat ISO 9001:2015 Lingkup Balai

Selanjutnya, Sertifikasi ISO 9001:2015 ini juga BRMP Sayuran terapkan pada proses perbenihan di bagian UPBS selaku produsen benih bermutu. Pada tahun ini, telah dilakukan pelaksanaan audit eksternal (sertifikasi ulang) untuk lingkup Produksi Benih Hortikultura oleh LSSMBTPH pada tanggal 9 – 11 Juli 2025 dengan hasil 9 ketidaksesuaian kategori minor dan satu peluang peningkatan, yang mana semuanya telah ditindaklanjuti sehingga UPBS BRMP Sayuran juga dapat mempertahankan Sertifikat 9001:2015 untuk lingkup benih bermutu.


LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MUTU
BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

SERTIFIKAT SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN MUTU

Diberikan kepada :

UPBS BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN SAYURAN

Alamat

Jl. Tangkuban Perahu No. 517 Lembang, Bandung 40391, Jawa Barat

sebagai

Produsen Benih yang telah menerapkan sistem manajemen mutu sesuai SNI ISO 9001 : 2015
Ruang lingkup benih bermutu yang diproduksi sebagaimana tertampir pada sertifikat ini

KETUA,

Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc

Gambar 21. Sertifikat ISO 9001:2015 untuk Lingkup Benih Bermutu

Penerapan ISO yang ketiga yaitu pada lingkup Laboratorium Pengujian yang yang terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional. Pelaksanaan audit eksternal (Survailen II) laboratorium telah dilaksanakan pada tanggal 27 – 28 Mei 2025 dengan hasil penilaian, yaitu 21 ketidaksesuaian kategori 2 dan 4 observasi. Semua ketidaksesuaian telah ditindaklanjuti dan diverifikasi sehingga Laboratorium Penguji BPP Sayuran dapat mempertahankan akreditasinya hingga 20 Februari 2027. Bersama kegiatan surveillance ini, BRMP Sayuran juga mengajukan perluasan ruang lingkup pengujian benih untuk komoditas Kangkung, Mentimun, Buncis, Kacang Panjang, dan Bayam dengan parameter uji Kadar Air Benih, Uji Daya Berkecambah Benih, serta Uji Kemurnian Fisik Benih dan telah disetujui pada tanggal 18 November 2025.


SERTIFIKAT AKREDITASI

LP-798-IDN (Amd-2)*

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran

Jl. Tangkuban Perahu No. 517 Lembang, Jawa Barat

LABORATORIUM PENGUJIAN

SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)
Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Y. KRISTIANTO-WIDIWARDONO, MIT

PH. KETUA

Gambar 22. Sertifikat Akreditasi ISO 17025:2017 Laboratorium Penguji



KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Jakarta, 18 November 2025

Nomor : 1240/3.a1/LAB/11/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keputusan Akreditasi

Yth. Pimpinan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran
Jl. Tangkuban Perahu No.517
Lembang, Jawa Barat

Dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 18 November 2025, Komite Akreditasi Nasional telah memutuskan untuk memberikan akreditasi perluasan ruang lingkup kepada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran sebagai laboratorium penguji dengan nomor akreditasi LP-796-IDN.

Penerbitan suplemen lampiran sertifikat akreditasi sedang dalam proses dan akan kami informasikan kemudian.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Akreditasi
Badan Standardisasi Nasional
selaku Sekretaris KAN

Wahyu Purbowasito

Gambar 23. Pemberian Akreditasi terhadap Perluasan Ruang Lingkup Laboratorium Penguji

Selain penerapan ISO 9001:2015 dan 17025:2017, pada tahun 2025 BRMP Sayuran mendapatkan penilaian PPID kategori **Informatif** (Gambar 24) serta menerima penghargaan sebagai Peserta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 (Gambar 25)



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

Nomor : B-4979/RM.130/A/10/2025 31 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Hasil Penilaian Tahap Pertama Monev KIP Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025

Yth.
1. Direktur Jenderal/ Inspektur Jenderal/ Kepala Badan
2. Kepala Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis
Lingkup Kementerian Pertanian
di
tempat

Bersama ini disampaikan bahwa kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 saat ini telah menyelesaikan penilaian tahap pertama yaitu penilaian melalui formulir *Self Assessment* Questionnaire (SAQ) dan Website oleh tim verifikator terhadap 124 PPID UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian. Dari hasil penilaian tahap pertama telah di tetapkan UK/UPT dengan predikat Informatif sebanyak 98 UK/UPT yang akan mengikuti penilaian tahap kedua yaitu Validasi dan Wawancara (daftar nama UK/UPT terlampir).

Pada tahap validasi, UK/UPT yang mendapatkan predikat informatif diwajibkan untuk mengirimkan video tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan kerjanya. Kemudian akan dilakukan wawancara secara daring dan luring kepada Pimpinan UK/UPT untuk menggali lebih dalam pemahaman terkait komitmen dan inovasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik di masing-masing Unit Kerja (teknis pelaksanaan Validasi dan Wawancara terlampir).
Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan agar para Kepala UK/UPT dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal selaku Atasan Pejabat Kementerian Pertanian,

Ali Jamil, M.P.,Ph.D
NIP. 196508301988031001

Tembusan Yth:
1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia



III. ESELON III/IV
1. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar
2. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor
3. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau
4. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau
5. Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar
6. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran
7. Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk
8. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bangka Belitung
9. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik
10. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa
11. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat
12. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian D.I. Yogyakarta
13. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung
14. Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian
15. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah
16. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu
17. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara
18. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi
19. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan
20. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat
21. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika
22. Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak
23. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia
24. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri
25. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat
26. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur
27. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat
28. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan
29. Balai Veteriner Bukit Tinggi
30. Balai Veteriner Bandar Lampung
31. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah
32. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo
33. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua
34. Balai Veteriner Banjarbaru
35. Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil
36. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku
37. Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa
38. Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian
39. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma
40. Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
41. Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi
42. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat
43. Balai Embrio Ternak
44. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten
45. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur
46. Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak
47. Balai Perakitan dan Pengujian Jeruk dan Buah Sub Tropika
48. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh

Gambar 24. Hasil Penilaian Tahap Pertama Monev KIP Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 (Predikat Informatif)



Gambar 25. Piagam Penghargaan Sebagai Peserta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025

Selanjutnya Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran (BPP Sayuran) mencatat prestasi positif dengan meraih peringkat ke-9 kategori Informatif tingkat Eselon III dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025. Penghargaan tersebut diumumkan pada Rapat Koordinasi Kehumasan dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian yang digelar Senin, 22 Desember 2025 di Auditorium F Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Capaian ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen BRMP Sayuran dalam menyediakan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses sesuai ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2024, BRMP Sayuran tercatat berada pada kategori Menuju Informatif dengan peringkat ke-60, sehingga raihan tahun 2025 menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan.

Kategori Informatif diberikan kepada unit kerja yang dinilai memenuhi indikator keterbukaan informasi publik, termasuk ketersediaan informasi berkala, serta-merta, dan setiap saat, serta kualitas pelayanan permohonan informasi publik.

Keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi BRMP Sayuran untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta memperkuat kepercayaan publik terhadap Kementerian Pertanian.



Gambar 26. Piagam Penghargaan Sebagai Peringkat IX Kategori Informatif Unit Kerja Eselon III Dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025

Selain itu juga, terdapat satu pegawai BPP Tanaman Sayuran yang mendapatkan penghargaan sebagai Pejabat Fungsional Teknis Non Pertanian Jenjang Keterampilan Terbaik Tahun 2025 Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertaninan, yaitu diberikan kepada saudara Mochlisin Fatkur Rahman sebagai Pegawai Teladan. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja saudara Mochlisin Fatkur Rahman dan mendedikasikan dirinya bekerja sepenuh hati dan totalitas.



Gambar 27. Sertifikat Penghargaan Sebagai Pejabat Fungsional Teknis Non Pertanian Jenjang Keterampilan Terbaik Tahun 2025

C. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika

Hingga Desember 2025, ada beberapa capaian kinerja lainnya yang telah diperoleh oleh BPP Tanaman Buah tropika termasuk dari Kementerian Keuangan RI (Tabel 16).

Tabel 16. Capaian kinerja lainnya selama 2025

No	Uraian	Keterangan
1.	Peringkat kedua dalam kategori Digitalisasi Pembayaran melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) periode semester II TA 2024	Oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumbar, KPPN Solok
2.	Peringkat pertama pada penilaian satuan kerja berprestasi berdasarkan Indikator Kinerja (IKPA) kategori dengan Bobot Indikator 80 periode Semester II TA 2024	Oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumbar, KPPN Solok
3.	Peringkat kedua pada kategori Penyampaian Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan periode Semester II TA 2024	Oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumbar, KPPN Solok
4.	Peringkat ketiga pada penilaian satuan kerja berprestasi berdasarkan kepatuhan dalam penyampaian Laporan Saldo Rekening periode Semester II TA 2024	Oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sumbar, KPPN Solok
5.	Katagori INORMATIF peringkat enam unit kerja eselon III dalam Anugrah Keterbukaan Informasi Publik tahiun 2025	Oleh Kementerian Pertanian

BPP Tanaman Buah Tropika pada tahun 2025 juga menginisiasi terbentuknya SNI manggis. Setelah dilakukan dua kali Rapat Teknis (Ratek) dengan Komitek Teknis

(Komtek) 65-15 Hortikultura, RSNI Manggis telah selesai tahapan jajak pendapat dan sudah dalam proses penerbitan sebagai SNI Manggis oleh BSN. Sementara itu, untuk RSNI Markisa telah diupload form usulan PNPS dan Draf RSNI Markisa melalui aplikasi https://pnps1.puslithorti.net/.

Capaian kegiatan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian

Dalam mendukung pendampingan program strategis Kementerian Pertanian, BPP Tanaman Buah Tropika telah mengadakan beberapa kegiatan berupa:

1. Menghadiri Undangan Acara *Launching* Program Unggulan Bantuan Bertanam di Kabupaten Tanah Datar
2. Workshop dalam rangka koordinasi dan konsolidasi penggunaan dana serta pelaporan kegiatan strategis Kementerian Pertanian se lingkup BPP Tanaman Buah Tropika
3. Tim SATGAS Pangan BPP Tanaman Buah Tropika mendapingi kegiatan OPLAH, LTT dan Brigade Pangan sekabupaten Tanah Datar:

   Kegiatan reguler Luas Tambah Tanam (LTT) di Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 luas baku sawah (LBS) berdasarkan data dari pusat seluas 21.061 ha, target LTT dari pusat 72.532 ha, sedangkan kesanguppan daerah sebesar 51.757 ha. Realisasi LTT sampai 28 Desember 46.715,5 Ha (64,41 %) dari target yang ditetepkan pusat. Berdasarkan kesanggupan daerah persentase capaian realisasi LTT sampai 28 Desember sebesar 90,26 %.

   Kegiatan Optimalisasi Lahan (OPLAH) non rawa di Kabupaten Tanah Datar telah terlaksana melebihi target seluas 3125 Ha dari target pusat 3000 ha. Kegiatan tersebut dibagi menjadi 3 tahap tahap I seluas 675 Ha , Tahap II seluas 1325 Ha dan tahap III seluas 1140 Ha.

   Untuk target pembentukan Brigade Pangan sebanyakk 15 BP juga telah terealisasi 100 %. Seluruh BP telah dikukuhkan dan dilantik oleh Kepala Dinas Pertanian. BP juga telah mengikuti bombingan teknis yang diadakan oleh Polbangtan. Untuk menentukan arah dan aturan BP, seluruh BP telah menyusun Anggran Dasar dan Anggran Rumah Tangga (AD/ART) serta telah membuat proposal untuk mendapatkan bantuan alsintan dan saprodi.
4. Kegiatan reguler Luas Tambah Tanam (LTT) di Kabupaten Pasaman, target tahun 2025 berdasarkan data pusat LBS 42.839 ha, kesanggupan daerah 31.563 ha capaian realisasi sampai November seluas 30. 971, 5 ha. Capaian realisasi berdasarkan target dari pusat 76,44 %, berdasarkan kesanggupan daerah capaian sudah 100,7 %. Untuk Padi Gogo sudah terealisasi melebihi target dari pusat sebesar 630 ha sudah terealisasi per November 980 ha (155,6 5). Jumlah OPLAH target 1.325 Ha terbagi menjadi dua Tahap, Tahap I seluas 575 Ha dan Tahap II 750 ha sampai bulan November sudah terlealisasi 100 % dan pertengah Desember sudah BAST. Pembentukan BP (Brigade Pangan) di Kabupaten Pasaman target 6 BP terealisasi 5 BP. Brigade Pangan yang terbentuk antara lain BP. Muda Berkarya Kec. Rao Selatan, BP Basamo Rao

Selatan, Lubuk Sepakat Kec Lubuk Sikaping, BP Cahaya Muda Kec. Panti dan BP Equator di Kec. Bonjol. Sampai akhir tahun 2025 seluruh akan mengikuti BIMTEK yang diselenggrakan oleh Kabupaten. Pendampingan penyusunan AD/ART BP terus dilakukan tim SATGAS Pangan BRMP Buah Tropika agar seluruh pengurus BP dapat menentukan program kerja.

5. Koordinasi dan Sosialisasi Lapangan di Padang. Hasil yang diperoleh tersebut diperoleh informasi terkini mengenai progres pelaksanaan kegiatan optimalisasi lahan di beberapa kabupaten yang menjadi lokasi prioritas. PJP menyampaikan bahwa kegiatan pemanfaatan lahan tidur dan perbaikan jaringan irigasi terus diintensifkan guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Selain itu, dilakukan pembaruan data capaian Luas Tambah Tanam (LTT) sebagai dasar evaluasi kinerja mingguan, serta identifikasi beberapa kendala lapangan seperti ketersediaan air dan kesiapan benih.
6. Koordinasi Lanjutan Pelaksanaan Program LTT dan Oplah dengan Penanggung Jawab Provinsi (PJP) Sumatera Barat. Hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut PJP Sumatera Barat menyampaikan hasil dari data di lapangan serta progres pelaksanaan kegiatan di beberapa kabupaten. Selain itu, dibahas pula rencana aksi percepatan tanam dan optimalisasi pemanfaatan lahan tidur yang akan menjadi prioritas dalam periode berikutnya.



Gambar 28. Koordinasi LTT di Kab. Pasaman



Gambar 29. Koordinasi LTT di Kab. Tanah Datar

Capaian kegiatan implementasi pendampingan teknologi budidaya buah tropika

a. Kegiatan Program Competitive Grant (CG) ICARE berupa Pendampingan dan Produksi Benih Mangga Gadung 21 terstandar pendistribusian benih Mangga ke 3 desa untuk mendukung kawasan pengembangan mangga di Jawa Timur.

Kegiatan ini telah dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan koordinasi, pendampingan teknis, pembentukan dan pemeliharaan kebun blok fondasi, penyediaan batang bawah, produksi benih terstandar, serta distribusi benih mangga Gadung 21. Penguatan kapasitas petani mangga melalui bimbingan teknis perbenihan dan budidaya mangga.



Gambar 30. Koordinasi kegiatan ICARE dengan PIU BRMP Jatim

b. Kegiatan pendampingan teknologi budidaya tanaman buah tropika pada kegiatan community forest PT. Pupuk Indonesia di Jawa Barat

Dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan pendampingan kegiatan pengembangan tanaman buah-buahan pada program *Community Forest* yang berlokasi di Ciemas, BPP Tanaman Buah Tropika telah melaksanakan kegiatan monitoring dan pendampingan secara berkala. Untuk itu, pada tanggal 13 Nopember 2025 telah dilaksanakan monitoring lanjutan tahap II. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui progress kegiatan yang sedang berjalan sehingga tujuan dan target kegiatan yang telah direncanakan dapat direalisasi sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Dalam rangka penyamaan persepsi terkait tanaman di lapangan, pelaksanaan monitoring diawali dengan koordinasi antara PT. Pupuk Indonesia yang diwakili oleh Bu Nadila, Ibu Desy selaku perwakilan dari PT. Tiara Mitra Lestari, Kapten Usup dari Kostrad dan Tim BRMP Buah Tropika. Selanjutnya telah dilaksanakan monitoring dan pendampingan di lapang pada 2 lokasi yaitu di Ciemas dan dan Cianjur, Jawa Barat.



Gambar 31. Koordinasi pelaksanaan monitoring dan pendampingan kegiatan pengembangan budidaya tanaman buah tropika pada program *Community forest* PT. Pupuk Indonesia

c. Kegiatan hilirisasi implementasi pendampingan budidaya tanaman buah tropika di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

Kegiatan ini merupakan kegiatan BIMTEK dan pendampingan budidaya tanaman Mangga, Durian, Rambutan dan Salak yang dilaksanakan di Kecamatan Pettalasang. Kegiatan awal berupa koordinasi dengan Kepala BRMP Sulawesi Selatan untuk berkoordinasi terkait pelaksanaan kegiatan. Rangkaian kegiatan selanjutnya berupa pelaksanaan survey lokasi, pendampingan dan pelaksanaan bimbingan teknis budidaya tanaman buah tropika meliputi: pemupukan, pemangkasan, pengendalian lalat buah (perangkap) dan induksi pembungan Mangga.

d. Kegiatan BIMTEK Budidaya dan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Mangga dalam Mendukung Pembangunan Klinik Modernisasi Pertanian di Jawa Timur
Kegiatan ini merupakan pendampingan dan pelaksanaan Bimtek di Pasuruan, Jawa Timur. Kegiatan diawali dengan koordinasi antara BRMP Jawa Timur dengan tim BRMP Buah Tropika terkait pemilihan lokasi dan pelaksanaan kegiatan.

e. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias

Capaian Kinerja lainnya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja BPP Tanaman Hias pada tahun 2025 adalah: (1) penyusunan Rancangan SNI (RSNI) *Leather Leaf* dan mawar potong; (2) kinerja kegiatan rutin manajemen administrasi BPP Tanaman Hias; (3) Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian; dan (4) kerjasama SAKATA Seed Corporation dan HIRATA Corporation.

Penyusunan Rancangan SNI (RSNI) *Leather Leaf* dan mawar potong

Kegiatan ink telah memasuki proses jajak pendapat dan penyusunan Pengembangan Metode Pengujian untuk mawar potong. Jajak pendapat disebarluskan oleh BSN selama 30 hari kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa RSNI *Leather Leaf* telah disusun sedemikian rupa.

Kinerja kegiatan rutin manajemen administrasi BPP Tanaman Hias

Kinerja kegiatan rutin manajemen tahun 2025 telah menghasilkan sejumlah capaian yang terdiri atas (1) BPP Tanaman Hias meraih 2 penghargaan terkait transaksi keuangan terbaik periode Semester I tahun 2025 Lingkup KPPN Sukabumi serta (2) BPP Tanaman Hias meraih Sertifikat SMM Layanan Manajemen dan Administrasi SNI ISO 9001: 2015.

BPP Tanaman Hias meraih 2 penghargaan terkait transaksi keuangan terbaik periode Semester I tahun 2025 Lingkup KKPN Sukabumi pada 28 Agustus 2025 (Gambar 32) sebagai: Peringkat Keenam Satuan Kerja Terbaik dengan Jumlah Transaksi CMS Terbanyak Lingkup KPPN Sukabumi Periode Semester 1 Tahun 2025; dan Peringkat Ketiga Satuan Kerja Terbaik Kategori Transaksi KKP Terbangak Lingkup KPPN Sukabumi Periode Semester 1 Tahun 2025. Sedangkan Sertifikat SMM Layanan Manajemen dan Administrasi SNI ISO 9001:2015 diperoleh BPP Tanaman Hias pada tanggal 29 Oktober 2025 (Gambar 33).



Gambar 32. Piagam Perhargaan transaksi keuangan terbaik Lingkup KKPN Sukabumi



Gambar 33. Sertifikat SNI ISO BPP Tanaman Hias

Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian

BPP Tanaman Hias juga berpartisipasi dalam Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian terkait swasembada pangan, yaitu (1) Luas Tambah Tanam (LTT) padi dan (2) Optimasi lahan (Oplah) di Kota Banjarbaru (Kalimantan Selatan); serta (3) Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Cianjur (Jawa Barat). LTT di Kota Banjarbaru hanya 40 ha atau 95,24% dari target dan diperkirakan akan panen pada akhir Januari 2026. Tercapainya target Kota Banjarbaru pada bulan Oktober karena sebagian besar wilayah kecamatan, terutama Kecamatan Banjarbaru Utara dan Cempaka mulai memasuki masa tanam, setelah selesai masa panen.

Dalam rangka pencapaian target tanam bulan Oktober, telah dilaksanakan tanam bersama Kelompok Tani Bumi Makmur di Kelurahan Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kalimantan Selatan pada Senin 27/10/2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Banjarbaru, Kepala BPP dan Penyuluh Banjarbaru Utara, Tokoh Masyarakat, dan Kelompok Tani Bumi Makmur.



Gambar 34. Penanaman benih padi pada LTT di Kalimantan Selatan

Oplah di Provinsi Kalimantan Selatan luas OPLAH dilaksanakan pada lahan seluas 30.566 ha, khusus di Kota Banjarbaru sekitar 288 ha, yang tersebar di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Liang Anggang seluas 88 ha dan Kecamatan Cempaka seluas 200 ha. Hingga akhir November 2025, SID tersedia mencapai 289 ha dari target 88 ha atau 328%. Untuk pekerjaan kontruksi OPLAH telah selesai dilaksanakan di Kecamatan Liang Anggang pada lahan seluas 88 ha, dan sebagian dari lahan tersebut telah ditanami.

Sementara di Kecamatan Cempaka, kontruksi baru dilaksanakan pada lahan 100 ha dan diperkirakan selesai pada bulan Desember dan selanjutnya bisa ditanami. Kontruksi ini dilaksanakan oleh Kodim 1006 Banjar. Program OPLAH bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) Padi melalui perbaikan/normalisasi saluran, pembuatan pintu air, pembuatan jalan usahatani, dll. Evaluasi terhadap IP awal (sebelum dilakukan Oplah), yaitu luas tanam Oktober 2024 sd September 2025 di lokasi Oplah 2025. Penentuan IP awal sangat penting untuk menentukan tingkat keberhasilan dari Oplah. Berdasarkan kriteria tersebut bahwa IP awal pada lahan seluas 288 ha sebagai berikut:

- Luas Oplah 200 ha: tanam 224 ha, IP = 1,12
- Luas Oplah 88 ha: tanam 11 ha, IP = 0,12.

Untuk mengoptimal OPLAH, telah pula dibentuk Brigade Pangan (BP). Pembentukan BP di lahan Oplah 200 ha telah diinisiasi sejak bulan Mei 2025, dan saat ini telah terbentuk dengan nama Patriot Maju Makmur. BP Patriot Maju Makmur beranggota 15 orang yang diketuai Muhammad Sugiarto. BP ini akan mengelola lahan seluas 200 ha yang berada di Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka.



Gambar 35. Brigade Pangan (BP) Patriot Maju Makmur di lokasi Oplah

Pekarangan Pangan Lestari (P2L) BPP Tanaman Hias di Cianjur (Jawa Barat). Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain (1) demplot tanaman sayur (Pakcoy, caisim, kancang panjang, kangkung, bayam, dll); serta (2) ternak (ikan lele).



Gambar 36. Pengelolaan tanaman sayuran dan ternak

Kerjasama SAKATA Seed Corporation dan HIRATA Corporation

Kerjasama BPP Tanaman Hias dengan SAKATA *Seed Corporation* (SSC) merupakan program kegiatan evaluasi dan pemuliaan SDG *Impatiens*. Sedangkan Kerjasama dengan HIRATA Corporation difokuskan pada kegiatan ekstrak tumbuhan dan minyak atsirinya sebagai agen antimikroba potensial untuk pewarna makanan, kosmetik dan perlengkapan mandi, serta kegunaan farmasi dari SDG tanaman hias, seperti bunga telang dan tanaman hias lainnya. Kegiatan-kegiatan ini merupakan Kerjasama hibah luar negeri dari Jepang.

Pemeliharaan tanaman induk dan klon-klon Impatiens hasil persilangan, termasuk tanaman hasil perlakuan kolkhisin. Pemeliharaan terdiri atas penyiraman, pemupukan, pengendalian HPT, dan menyiangan gulma. Tindak lanjut Kunjungan Tim Sakata Jepang ke Indonesia, yaitu melengkapi draft TCP dan penyusunan program eksplorasi. Berdasarkan minute meeting bersama Tim Sakata pada 28 Agustus 2025, maka disusun program eksplorasi pada 2025 -2030

di empat lokasi bagian barat Sumatra ditambah dengan satu lokasi pada 2025 di Provinsi Jawa Tengah, termasuk DIY Yogyakarta.

Pada Kesempatan ini telah dilakukan eksplorasi di Jawa Tengah, sebagai berikut: Taman Nasional Gunung Merapi (Sleman-Yogyakarta); Dusun III Berubahan, Kemutug Lor, Baturaden, Banyumas Regency-Jawa Tengah; Wonosobo-Jawa Tengah; Gunung Sumbing Wonosobo, Gn. Malang, Purwojiwo, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo-Jawa Tengah, Gn. Malang, Purwojiwo, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah; Kulon Progo Regency, Yogyakarta; Kulon Progo Regency-Yogyakarta; dan Patuk, Gunung Kidul Regency-Yogyakarta (Gambar 37).



Gambar 37. Lokasi eksplorasi: (a) Kulon Progo Regency dan (b) Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta

Penanaman koleksi SDG pada kegiatan HIRATA Corporation terdiri atas *Etlingera elatior, Coleus scutellaroides* dan *Cordyline frutiosa*. Empat varians species Benih *Etlingera elatior* yang ditanam merupakahan hasil perbanyakan tanaman melalu pemisahan rimpang yang berasal dari Beunying Kecamatan Sukaresmi. *Coleus scutellaroides* dan *Cordyline frutiosa* yang ditanam masing-masing tujuh dan tujuh belas jenis. Tanaman ini merupakan koleksi BPP Tanaman Hias yang diperoleh dari berbagai daerah.

f. Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika

Kerjasama Hirata (*Development of Potent Food Supplement from Citrus and Its Wild Relatives*)

Pelaksanaan kegiatan 2025 untuk kegiatan Kerjasama Hirata berlangsung cukup baik. Kegiatan eksplorasi difokuskan di pulau Jawa karena kebijakan pembatasan atau efisiensi perjalanan dinas. Dari kegiatan eksplorasi diperoleh materi buah jeruk Ragi dari Majalengka, jeruk Sambal dari Pasuruan, jeruk Tawangmangu dari Tawangmangu dan Jeruk Bokor dari Karimunjawa. Tambahan sampel diperoleh dari koleksi SDG untuk nipis manis dan Sitaya. Pemeliharaan koleksi dilakukan di kultur jaringan untuk lima aksesi dan untuk di lapang 17 aksesi dengan total 85

tanaman. Untuk analisa lanjutan, sampel disiapkan berupa serbuk kering dengan kadar air dibawah 10%. Hasil analisa metabolit sekunder terhadap 20 sampel jeruk menunjukkan terdapat senyawa D-limonene pada 14 sampel, utamanya pada daun purut, buah limau pagar, buah dan daun sambal, buah kalamansi (tinggi dan rendah), dan buah pamelo (semua varietas). *β-panasinsene* ditemukan pada 9 sampel utamanya pada batang dan buah purut.

Tabel 17. Daftar Kegiatan Hirata

No	Lokasi	Tanggal	Koleksi	Dokumentasi
1	Kebun Tlekung, Jawa Timur (950 m dpl)	3 Maret 2025	*C. aurantifolia* Nama lokal: nipis manis Catatan : Koleksi SDG	
2	Desa Tlekung, Jawa Timur (950 m dpl)	3 Maret 2025	*C. aurantifolia* Nama lokal: nipis Catatan: dimanfaatkan untuk minuman dan bumbu masak	
3	Kebun Tlekung, Jawa Timur (950 m dpl)	30 April 2025	*C. nobilis* Nama lokal: Jeruk Sitaya Catatan : Koleksi SDG	
4	Tawangmangu, Jawa Tengah (450 m dpl)	14 Mei 2025	*C. sinensis* Nama lokal: jeruk tawangmangu Catatan : buah konsumsi segar	

No	Lokasi	Tanggal	Koleksi	Dokumentasi
5	Pasuruan, Jawa Timur (100 m dpl)	15 Mei 2025	*C. amblycarpa* Nama lokal: jeruk sambal Catatan : dimanfaatkan untuk bumbu masak	
6	Majalengka, Jawa Barat (11 m dpl)	20 Mei 2025	*C. reticulata* Nama lokal: jeruk ragi Catatan : buah konsumsi segar	
7	Karimunjawa, Jawa Tengah (10 m dpl)	9 Juli 2025	*Citrus sp.* Nama lokal: jeruk bokor Catatan : buah konsumsi segar	

ICARE: Implementasi Teknologi PTKJS dan Aplikasi Sistem Pakar Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Jeruk dalam Mendukung Keberlanjutan Agribisnis Jeruk di Sentra Produksi Kalimantan Barat

Kegiatan Competitive Grant PTKJS ini telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan target output tahun 2025, yaitu terpeliharanya demplot kebun jeruk sehat seluas 2 hektar, meningkatnya pengetahuan dan kapasitas petani melalui kegiatan bimtek yang ditunjukkan melalui hasil pretest dan post-test, serta terlaksananya inisiasi bisnis antara koperasi ICARE dan mitra kerjasama yang akan dilanjutkan dengan Mou tahun 2026. Kegiatan ini menunjukkan potensi yang cukup tinggi bagi keberlanjutan program implementasi teknologi Pengelolaan Terpadu Kebun Jeruk Sehat (PTKJS) dan aplikasi sistem pakar OPT jeruk. Secara ekonomi, penerapan PTKJS, sistem pakar OPT, AEsPro dan pupuk hayati berpotensi meningkatkan produktivitas dan kualitas jeruk melalui pengelolaan kebun yang lebih optimal, pengendalian OPT yang tepat sasaran, serta penggunaan input produksi yang lebih efisien. Sedangkan secara sosial, kegiatan ini berkontribusi dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan jejaring kerja, serta penguatan kelembagaan

petani. Keterlibatan berbagai pihak mulai dari petani, penyuluh pertanian lapangan, petugas POPT, fasilitator ICARE, koperasi, hingga pemerintah daerah akan menciptakan ekosistem kolaboratif dalam pengelolaan agribisnis jeruk.



Gambar 38. Dokumentasi kegiatan ICARE : PTKJS

Pendampingan Produksi Benih Sumber Hortikultura (Bawang Putih)

Program swasembada bawang putih Indonesia adalah upaya pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan lembaga terkait (seperti BRMP) untuk meningkatkan produksi lokal secara signifikan, mengurangi ketergantungan impor, dan mencapai kemandirian pangan dengan strategi seperti perluasan lahan tanam, pengembangan benih unggul bersertifikat, inovasi teknologi, serta kolaborasi erat antara pemerintah, petani, importir (skema kewajiban tanam 5%), dan offtaker.

Target produksi benih 4 ton benih berpotensi dapat tercapai. Namun tantangan yang harus dihadapi adalah benih yang kurang berkualitas, CVL yang banyak dan lingkungan yang kurang mendukung produksi (efektifitas pengendalian OPT dan pemupukan yang kurang akibat CH tinggi). Paket teknologi Proliga sudah terlaksana dengan baik, namun perlu ada inovasi yang lebih spesifik (lokasi dan varietas).



Gambar 39. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Produksi Benih Sumber Hortikultura (Bawang Putih)

Perumusan SNI Jeruk Siam

Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Jeruk siam telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BSN No. 8/KEP/BSN/1/2025 tentang Program Nasional Perumusan Standar Tahun 2025. Penyusunan konsep Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Jeruk siam dilakukan oleh tim konseptor dari internal BRMP Jestro dan pihak eksternal. Tim konseptor yang terlibat dalam penyusunan RSNI tersebut mewakili dari berbagai unsur pemangku kepentingan seperti pemerintah, peneliti, pelaku usaha, dan produsen. Dokumen yang dihasilkan dari penyusunan konsep (drafting) ini adalah RSNI1 Jeruk siam.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan Rapat Teknis (Ratek) untuk membahas RSNI1 yang sudah dihasilkan. Rapat Teknis diselenggarakan oleh PPMP Hortikultura selaku sekretariat Komite Teknis (Komtek) 65-15 Hortikultura. Ratek pembahasan RSNI Jeruk siam dilakukan sebanyak dua kali, dan dihadiri oleh Komtek 65-15 Hortikultura beserta tim konseptor dan BSN. Dokumen yang dihasilkan dari Ratek adalah RSNI2 Jeruk siam.

Selanjutnya Rapat Konsensus (Rakon) merupakan tahapan yang juga diselenggarakan oleh PPMP Hortikultura untuk membahas RSNI2 yang sudah dihasilkan. Rakon diikuti oleh Komtek 65-15 Hortikultura dengan ketentuan terpenuhinya kuorum serta keterwakilan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, Rakon juga dihadiri oleh tim konseptor dan BSN. Dokumen yang dihasilkan dari Rakon adalah RSNI3 Jeruk siam.

Rancangan standar berupa RSNI3 Jeruk siam selanjutnya menjadi kewenangan BSN untuk diproses pada tahapan jajak pendapat hingga penetapan sebagai SNI. Tahap jajak pendapat dilaksanakan selama satu bulan dan bersifat terbuka untuk

umum. Masukan dan saran yang diperoleh selama periode tersebut selanjutnya diakomodasi dan disesuaikan oleh BSN. Dokumen hasil penyempurnaan berdasarkan jajak pendapat dituangkan dalam Rancangan Akhir SNI (RASNI), yang kemudian ditetapkan menjadi SNI 9409:2025 berdasarkan Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 744/KEP/BSN/12/2025 tentang Penetapan SNI 9409:2025 Jeruk siam.

3.2. Realisasi Anggaran

Dalam era anggaran berbasis kinerja (ABK), maka prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja dalam pemanfaatan penggunaan anggaran perlu dirumuskan secara konkret dan terukur. Indikator keberhasilan tidak hanya mampu meningkatkan produksi dan kualitas tetapi akuntabilitas penggunaan anggarannya harus dapat dianggap sebagai investasi. Dengan pendekatan tersebut maka pada tahun 2025 telah dirancang RKA-KL yang kemudian menjadi bahan penyusunan DIPA. Sumber anggaran yang digunakan selama ini berasal dari dana APBN, serta kegiatan kerjasama luar negeri.

a. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2025

Anggaran tahun 2025 lingkup PPMP Hortikultura mempunyai pagu awal sebesar Rp65.303.274.000,-. Alokasi anggaran per UK/UPT lingkup PPMP Hortikultura tahun 2025 sebagai berikut: Satker PPMP Hortikultura Rp8.429.548.000,-, BPP Tanaman Sayuran Rp17.527.337.000,-, BPP Tanaman Buah Tropika Rp16.281.997.000,-, BPP Tanaman Hias Rp12.587.390.000,-, dan BPP Tanaman Buah Jeruk dan Subtropika Rp10.477.002.000,-.

Realisasi berdasarkan Pagu Anggaran Total yaitu **Rp65.303.274.000**, realisasi keuangan lingkup PPMP Hortikultura sampai dengan 31 Desember 2025 secara keseluruhan mencapai **Rp64.508.257.099 (98,78%)**. Persentase realisasi capaian keuangan dari masing-masing UK/UPT lingkup PPMP Hortikultura adalah sebagai berikut: Satker PPMP Hortikultura 97,96%, BPP Tanaman Sayuran Lembang 99,04%, BPP Tanaman Buah Tropika Solok 98,65%, BPP Tanaman Hias Segunung 99,01%, dan BPP Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika 98,93%.

Dalam perjalanannya DIPA PPMP Hortikultura mengalami beberapa kali revisi, hal ini disebabkan karena: revisi POK, pemblokiran anggaran, pengalihan anggaran, penambahan pagu dari PNBP, dan adanya dana hibah, sehingga anggaran lingkup PPMP Hortikultura mengalami perubahan menjadi Rp64.974.484.000,-. Pemblokiran anggaran lingkup PPMP Hortikultura yaitu Rp328.790.000,-.
Sementara itu, realisasi berdasarkan Pagu Anggaran Efektif sebesar **Rp64.974.484.000**, realisasi keuangan lingkup PPMP Hortikultura sampai dengan 31 Desember 2025 secara keseluruhan mencapai **Rp64.508.257.099**

(99,28%). Persentase realisasi capaian keuangan dari masing-masing UK/UPT lingkup PPMP Hortikultura adalah sebagai berikut: Satker PPMP Hortikultura 99,55%, BPP Tanaman Sayuran Lembang 99,31%, BPP Tanaman Buah Tropika Solok 99,01%, BPP Tanaman Hias Segunung 99,41%, dan BPP Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Tlekung 99,30%. Rincian realisasi anggaran masing-masing UK/UPT lingkup PPMP Hortikultura berdasarkan pagu total dan pagu efektif dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Realisasi DIPA Desember 2025 UK/UPT Lingkup PPMP Hortikultura Berdasarkan Pagu Total dan Pagu Efektif

Satker	Pagu Total (Rp)	Pemblokiran (Rp)	Pagu Aktif (Rp)	Realisasi	% Realisasi terhadap pagu total	% Realisasi terhadap pagu efektif
PPMP Hortikultura	8.429.548.000	133.650.000	8.295.898.000	8.258.212.722	97,96	99,55
BPP Tanaman Sayuran	17.527.337.000	46.800.000	17.480.537.000	17.359.862.340	99,04	99,31
BPP Tanaman Buah Tropika	16.281.997.000	59.170.000	16.222.827.000	16.062.680.867	98,65	99,01
BPP Tanaman Hias	12.587.390.000	50.400.000	12.536.990.000	12.462.938.628	99,01	99,41
BPP Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	10.477.002.000	38.770.000	10.438.232.000	10.365.274.642	98,93	99,30
Jumlah	65.303.274.000	328.790.000	64.974.484.000	64.508.969.199	98,78	99,28

Sumber data: SAKTI dan OMSPAN (per 31 Desember 2025)

Anggaran belanja dalam rangka operasional kegiatan PPMP Hortikultura dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja kementerian negara/lembaga. Pagu PPMP Hortikultura dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Komposisi anggaran Lingkup PPMP Hortikultura per jenis belanja tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19.Anggaran Per Jenis Belanja lingkup PPMP Hortikultura TA. 2025

Satker	Belanja Pegawai			Belanja Barang			Belanja Modal		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PPMP Hortikultura	2.552.828.000	2.532.822.445	99,26	5.744.070.000	5.724.678.177	99,66	-	-	-
BPP Tanaman Sayuran	6.361.589.000	6.346.922.000	99,77	11.065.118.000	10.988.000.432	99,30	53.830.000	24.940.000	46,33
BPP Tanaman Buah Tropika	7.052.942.000	7.019.614.704	99,53	9.169.885.000	9.042.685.964	98,61	-	-	-

Satker	Belanja Pegawai			Belanja Barang			Belanja Modal		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
BPP Tanaman Hias	4.557.992.000	4513.382.173	99,02	7.296.483.000	7.267.041.455	99,60	682.515.000	682.515.000	100
BPP Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	4,701.972.000	4.676.211.709	99,45	5.565.352.000	5.533.316.307	99,42	170.908.000	155.746.626	91,13
Total	25.226.323.000	25.089.333.138	99,46	38.840.908.000	38.555.722.335	99,27	907.253.000	863.201.626	95,14

Sumber data: OMSPAN (per 31 Desember 2025)

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa belanja barang menempati penyediaan pagu yang paling tinggi yang diikuti dengan belanja pegawai dan terakhir belanja modal. Rerata realisasi anggaran per UK/UPT per jenis belanja lingkup PPMP Hortikultura menunjukkan hasil yang baik, yaitu di antara 95,14% - 99,04%. Akuntabilitas keuangan tidak terlepas dari berhasilnya pencapaian sasaran yang dicapai oleh PPMP Hortikultura dengan penjabaran pencapaian kegiatan utama berdasarkan PK yang dihasilkan oleh UK/UPT lingkup PPMP Hortikultura pada tahun 2025.

Berdasarkan RO kegiatan, realisasi lingkup PPMP Hortikultura disajikan pada Tabel 20 sampai Tabel 24. Pada Tabel 20 sampai Tabel 24 menjajikan pagu anggaran, realisasi anggaran, dan realisasi fisik dari masing-masing RO yang ada di lingkup PPMP Hortikultura.

Tabel 20. Rincian Pagu Anggaran per Output Kegiatan PPMP Hortikultura TA. 2025

RO	Uraian	Anggaran			Fisik		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
6918.AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementan	962.920.000	960.429.931	99,74	1	1	100
6918.EBA.956	Layanan BMN	8.050.000	7.954.700	99,52	1	1	100
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	19.685.000	19.217.000	97,62	1	1	100
6918.EBA.962	Layanan Umum	444.965.000	442.458.437	99,44	1	1	100
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	6.835.628.000	6.803.641.154	99,53	1	1	100
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	24.650.000	24.511.500	99,44	1	1	100
Total		**8.295.898.000**	**8.258.212.722**	**99,55**			

Tabel 21. Rincian Pagu Anggaran per Output Kegiatan BPP Tanaman Sayuran TA. 2025

RO	Uraian	Anggaran			Fisik		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
7911.BJA.102	Laporan Hasil Uji Instrumen Hortikultura	1.164.56.000	1.097.922.783	94,31			
7911.CAG.102	Instrumen Hortikultura yang diuji	53.830.000	24.940.000	46,33			
7912.RAG.103	Benih Sumber Tanaman Hortikultura	2.604.402.000	2.602.933.964	99,94			
6918.AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	561.460.000	559.093.781	99,58	1	1	100
6918.EBA.956	Layanan BMN	10.000.000	5.924.300	59,24	1	1	100
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat & Informasi	19.000.000	16.000.000	84,21	1	1	100
6918.EBA.962	Layanan Umum	171.000.000	133.722.769	78,20	1	1	100
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	12.933.589.000	12.912.401.743	99,84	1	1	100
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan & Evaluasi	10.000.000	6.923.000	69,23	1	1	100
Total		**17.527.337.000**	**17.359.862.340**	**99,04**			

Tabel 22. Rincian Pagu Anggaran per Output Kegiatan BPP Tanaman Buah Tropika TA. 2025

RO	Uraian	Anggaran			Fisik		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
7911.BJA.102	Laporan Hasil Uji Instrumen Hortikultura	46.700.000	46.700.000	100			
7911.CAG.102	Instrumen Hortikultura yang diuji	200.505.000	200.505.000	100			
6918.AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	465.000.000	443.029.368	95,28	1	1	100
6918.EBA.956	Layanan BMN	10.000.000	5.351.800	53,52	1	1	100
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat & Informasi	25.000.000	16.326.219	65,30	1	1	100

RO	Uraian	Anggaran			Fisik		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
6918.EBA.962	Layanan Umum	150.000.000	110.855.393	73,90	1	1	100
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	15.309.792.000	15.178.293.087	99,14	1	1	100
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan & Evaluasi	25.000.000	11.620.000	46,48	1	1	100
Total		**16.281.997.000**	**16.062.680.867**	**98,65**			

Tabel 23. Rincian Pagu Anggaran per Output Kegiatan BPP Tanaman Hias TA. 2025

RO	Uraian	Anggaran			Fisik		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
7911.BJA.102	Laporan Hasil Uji Instrumen Hortikultura	1.791.528.000	1.787.224.473	99,76	40	40	100
6918.AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	462.030.000	444.726.433	96,25	1	1	100
6918.EBA.956	Layanan BMN	7.235.000	7.050.000	97,44	1	1	100
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat & Informasi	15.500.000	15.320.000	98,84	1	1	100
6918.EBA.962	Layanan Umum	127.465.000	123.791.035	97,12	1	1	100
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	10.123.832.000	10.076.256.687	99,53	1	1	100
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan & Evaluasi	9.400.000~~9.400.000~~	8.570.000~~8.570.000~~	91,17	1	1	100
		12.536.990.000	**12.462.938.628**	**99,41**			

Tabel 24. Rincian Pagu Anggaran per Output Kegiatan BPP Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika TA. 2025

RO	Uraian	Anggaran			Fisik		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
7911.BJA.102	Laporan Hasil Uji Instrumen Hortikultura	252.782.000	250.840.993	99,23			
7911.CAG.102	Sarana Laboratorium Hortikultura Modern	170.908.000	155.746.626	91,13	1	1	100
6918.AEA.101	Koordinasi Pendampingan Program Strategis	569.780.000	563.535.277	98,90	1	1	100

RO	Uraian	Anggaran			Fisik		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
	Kementerian Pertanian						
6918.EBA.956	Layanan BMN	5.200.000	5.083.800	97,77	1	1	100
6918.EBA.962	Layanan Umum	142.880.000	142.468.333	99,71	1	1	100
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	9.273.532.000	9.225.284.651	99,48	1	1	100
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan & Evaluasi	12.900.000	12.821.546	99,39	1	1	100
Total		**10.438.232.00**	**10.365.274.642**	**99,30**			

b. Perbandingan Realisasi Anggaran tahun 2024 dengan Realisasi Anggaran tahun 2025

Pagu anggaran lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura tahun 2024 lingkup PSI Hortikultura sebesar **Rp 65.224.085.000** dengan capaian realisasi sampai dengan 15 Januari 2025 sebesar **Rp61.397.581.023** (92,67%). Sedangkan pagu anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tahun 2025 lingkup PPMP Hortikultura sebesar **Rp65.303.274.000** dengan capaian realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar **Rp64.508.257.099** (99,28%). Realisasi tersebut merupakan realisasi terhadap Pagu Anggaran Total termasuk di dalamnya blokir anggaran. Dibandingkan anggaran tahun 2024, DIPA PPMP Hortikultura pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp79.189.000. Penambahan anggaran tersebut terdapat pada belanja pegawai dan belanja modal. Secara rinci, perbandingan pagu TA. 2024 dengan Pagu TA. 2025 per jenis belanja ditampilkan pada Tabel 25.

Tabel 25. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran lingkup PPMP Hortikultura Tahun 2024 dan Tahun 2025 Menurut Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	23.737.110.000	23.038.883.431	97,06	25.226.323.000	25.089.333.138	99,46
2.	Belanja Barang	41.183.205.000	38.054.997.467	92,40	39.169.698.000	38.555.722.335	98,43
3.	Belanja Modal	303.770.000	303.700.125	99,98	907.253.000	863.201.626	95,14
	Total	**65.224.085.000**	**61.397.581.023**	**94,13**	**65.303.274.000**	**61.397.581.023**	**98,78**

Sumber data : OMSPAN

3.2.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Target dan Realisasi PNBP

Pada tahun 2025 PPMP Hortikultura menerima pendapatan dari PNBP yang berasal dari jenis penerimaan umum dan fungsional. Target PNBP lingkup PPMP Hortikultura TA. 2025 sebesar Rp1.662.614.000,- dengan rincian untuk masing-masing UK/UPT sebagai berikut: Satker PPMP Hortikultura Bogor Rp6.149.000,-, BPP Tanaman Sayuran Lembang Rp650.000.000,-, BPP Tanaman Buah Tropika Solok Rp428.000.000,-, BPP Tanaman Hias Segunung Rp175.465.000,-, dan BPP Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Tlekung Rp403.000.000,-.

Realisasi PNBP lingkup PPMP Hortikultura Tahun 2025 sebesar Rp 2.124.635.950,- dengan rincian untuk masing-masing UK/UPT sebagai berikut: Satker PPMP Hortikultura Bogor Rp50.025.000,-, BPP Tanaman Sayuran Lembang Rp705.378.630,-, BPP Tanaman Buah Tropika Solok Rp734.058.620,-, BPP Tanaman Hias Segunung Rp187.553.000,-, dan BPP Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Rp447.620.700,-. Realisasi PNBP TA 2025 dari penerimaan umum dan fungsional dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Rekapitulasi PNBP Tahun 2025 Lingkup PPMP Hortikultura

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2025		
		Pagu Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	**PPMP Hortikultura**			
	- Penerimaan umum	-	11.400.000	
	- Penerimaan Fungsional	6.149.000	38.625.000	
	Jumlah: 1	6.149.000	50.025.000	813,55
2.	**BPP Tanaman Sayuran**			
	- Penerimaan umum	-	194.631.038	
	- Penerimaan Fungsional	650.000.000	510.747.592	
	Jumlah: 2	650.000.000	705.378.630	108,51
3.	**BPP Tanaman Buah Tropika**			
	- Penerimaan umum	20.845.000	296.920.120	
	- Penerimaan Fungsional	407.155.000	437.138.500	
	Jumlah: 3	428.000.000	734.058.620	171,52
4.	**BPP Tanaman Hias**			
	- Penerimaan umum	-	2.000.000	
	- Penerimaan Fungsional	175.465.000	185.553.000	

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2025		
		Pagu Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Jumlah: 4	175.465.000	187.553.000	106,89
5.	**BPP Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika**			
	- Penerimaan umum	-	12.337.200	
	- Penerimaan Fungsional	403.000.000	435.283.500	
	Jumlah: 5	403.000.000	447.620.700	111,07
	Jumlah Penerimaan Umum (1 s/d 5)	20.845.000	517.288.358	2481,6
	Jumlah Penerimaan fungsional (1 s/d 5)	1.641.769.000	1.607.347.592	97,90
	Jumlah Seluruhnya	**1.662.614.000**	**2.124.635.950**	**127,79**

Pada tahun 2025 penerimaan sektor fungsional lebih besar dari penerimaan umum, di mana hal ini disebabkan oleh :

1) Peningkatan pendapatan dan realisasi PNBP pada tahun 2025 ini disebabkan oleh peningkatan penjualan hasil pertanian.
2) Pendapatan fungsional berasal dari pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan budidaya; pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standardisasi lainnya; pendapatan penggunaan sarana dan prasarana pertanian; pendapatan pengembangan sumberdaya; Jasa wisata pertanian; dan sewa lahan diseminasi berasal dari setoran jaminan pemeliharaan (klaim) CV.
3) Sumber penerimaan umum berasal dari kegiatan di Subbagian Tata Usaha.

Perbandingan Penerimaan PNBP Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Target PNBP Lingkup PPMP Hortikultura TA. 2025 sebesar Rp1.662.614.000,- dengan realisasi sebesar Rp2.124.635.950,- (127,79%). Pada Capaian kinerja realisasi penerimaan PNBP baik pada tahun 2024 maupun tahun 2025 melebihi target yang ditetapkan. Capaian realisasi tahun 2024 sebesar 160,77% dan pada tahun 2025 sebesar 127,79%. Hasil dari capaian PNBP kebun percobaan digunakan kembali untuk operasional kebun dan belanja modal. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 maka ketercapaian realisasi PNBP mengalami penurunan.



Gambar 40. Perbandingan Capaian Realisasi PNBP 2024 dan 2025

3.2.2. Hibah

Terdapat perubahan anggaran DIPA TA. 2025 pada Satker Lingkup PPMP Hortikultura yang disebabkan adanya dana hibah langsung dari negara lain dan badan internasional, yaitu untuk Satker BPP Tanaman Sayuran, BPP Tanaman Hias, serta BPP Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika. Keseluruhan penambahan dana hibah tersebut dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27. Rekapitulasi Penambahan Dana Hibah Lingkup PPMP Hortikultura

No	UK/UPT	Rincian (Rp)		
		Pagu Hibah	Realisasi	Sisa
1.	**PPMP Hortikultura**	-	-	-
2.	**BPP Tanaman Sayuran**			
	AFACI	459.080.000	459.042.461	37.539
	OnionsNZ	284.306.000	284.300.000	6.000
3.	**BPP Tanaman Buah Tropika**	-	-	-
4.	**BPP Tanaman Hias**			
	Hirata Corp	128.766.000	80.809.000	47.957.000
	Sakata	1.534.673.000	1.276.512.000	258.161.000
5.	**BPP Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika**			
	Hirata Corp	10.477.002.000	10.349.260.368	127.741.632
	TOTAL	**12.883.827.000**	**12.449.923.829**	**433.903.171**

Sumber data: SAKTI dan OMSPAN (per Desember 2025)

BAB IV
PENUTUP



BAB IV
PENUTUP

Laporan kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat informasi tentang organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis capaian kinerja.

Capaian kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura merupakan pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2025 sekaligus pelaksanaan tahun pertama Renstra Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura periode 2025-2029 sebagai Lembaga baru dengan tugas dan fungsi sesuai Permentan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Pada tahun 2025, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura telah berhasil melaksanakan empat sasaran kegiatan yang dijabarkan dalam empat IKSK. IKSK1 Persentase Produk Usahatani Hortikultura yang Tersertifikasi tidak memiliki target sehingga tidak ada capaian yang dihasilkan. IKSK2 Persentase Peningkatan Adopsi Teknologi Digital, *Smart Farming*, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura tidak memiliki target sehingga tidak ada capaian yang dihasilkan.

Capaian IKSK3 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura adalah sebesar 88,17 dari target 86,00 atau tercapai 102,52% dengan kategori sangat berhasil. Capaian IKSK4 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura adalah 99,79 dari target 92,00 atau tercapai 108,46% dengan kategori sangat berhasil. Dengan demikian, kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tahun 2025 telah berhasil dicapai dengan rata-rata persentase ketercapaian sebesar 105,49% menunjukkan keberhasilan dengan kategori sangat berhasil. Pagu anggaran untuk mendukung ketercapaian empat indikator kinerja tersebut adalah Rp65.303.274.000,- dengan capaian realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp64.508.257.099,- (98,78%).

Melalui program kegiatan TA. 2025, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura telah melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya kegiatan dukungan manajemen serta kegiatan produksi benih sumber bawang putih di lima lokasi, yaitu Lembang, KP Berastagi, Cipanas, Batu, dan KP Gurgur, kegiatan

program strategis Kementerian Pertanian mendukung swasembada pangan yaitu Luas Tambah Tanam (LTT), Operasi Lahan (Oplah), Padi Gogo, Cetak Sawah, dan Brigade Pangan dan program iCARE.

Berbagai capaian yang telah diraih oleh Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh jajaran, serta dukungan dari berbagai pihak terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi dan kolaborasi menjadi faktor kunci dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan program perakitan dan modernisasi pertanian hortikultura.

Namun demikian, untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang terencana dan berkelanjutan. Beberapa aspek potensial yang menjadi fokus peningkatan kinerja ke depan antara lain:

1) Peningkatan koordinasi dengan UK/UPT dan para pemangku kepentingan. Penguatan komunikasi, sinkronisasi perencanaan, serta harmonisasi pelaksanaan kegiatan perlu terus ditingkatkan guna menghindari tumpang tindih program serta memastikan keterpaduan pelaksanaan kegiatan dari pusat hingga daerah.
2) Penguatan sinergitas antar kegiatan
   Integrasi antar program dan kegiatan perlu dioptimalkan agar memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya.
3) Penguatan fungsi manajemen dan mitigasi risiko
   Diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan, termasuk identifikasi dini serta mitigasi risiko untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hambatan atau kegagalan dalam pelaksanaan program.
4) Penguatan dan optimalisasi sumber daya manusia (SDM)
   Peningkatan kompetensi teknis dan manajerial aparatur melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan budaya kerja yang profesional dan adaptif menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target kinerja.
5) Pengembangan dan peningkatan sarana serta prasarana pendukung
   Penyediaan dan modernisasi fasilitas pendukung kegiatan perakitan dan modernisasi pertanian hortikultura perlu terus ditingkatkan agar selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan lapangan.
6) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala
   Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan terukur akan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan serta pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif.

Dengan berbagai upaya perbaikan tersebut, diharapkan kinerja Pusat Perakitan

dan Modernisasi Pertanian Hortikultura pada tahun 2026 dapat meningkat secara lebih optimal, efektif, dan akuntabel dalam mendukung pembangunan hortikultura nasional.

LAMPIRAN

Lampiran 1. SOP Penyusunan LAKIN

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

NOMOR SOP	09/OT.225/H.3/5/2025
TANGGAL PEMBUATAN	01 Juni 2025
TANGGAL REVISI	06 Mei 2025
TANGGAL EFEKTIF	06 Mei 2025
DISUSUN OLEH	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
DISAHKAN OLEH	Kepala Pusat Dr. Ir. Sri Wijayanti Yusuf, M.Sc., Ph.D NIP. 196512202001122001

NAMA SOP	PENYUSUNAN LAKIN LINGKUP BSMP HORTIKULTURA
Kualifikasi pelaksana	
- Memahami prosedur dan panduan penyusunan LAKIN - Memiliki kemampuan melakukan penyusunan LAKIN - Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan mengasasi berbagai	
Peralatan/perlengkapan	
- Note book - Komputer dan printer - Kamera - Lakin Pusat - Lakin UPT	
Pencatatan dan pendataan	
- Data dan informasi pencapaian indikator kinerja	

Dasar Hukum	
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian - Tupoksi Kelompok Substansi dan Tim Kerja Kelompok Program dan Evaluasi dalam Keputusan Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Uraian Tugas Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian - Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
Keterkaitan	
- SOP Penyusunan Laporan Bulanan dan Triwulan - SOP Penyusunan Program dan Anggaran	
Peringatan	
1. Jika LAKIN untuk kegiatan utama lingkup BSMP Hortikultura tidak disusun maka BSMP mungkin Kementerian Pertanian akan kesulitan menyusun LAKIN 2. LAKIN BSMP Hortikultura merupakan bagian LAKIN BSMP	

SOP PENYUSUNAN BAHAN LAKIN LINGKUP
Pusast Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

No	Kegiatan	Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan	Ketua Kelompok Substansi Program & Evaluasi	Kepala Pusat	Mutu Baku			Ket.
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengirim permintaan LAKIN lengkap ke UPT lingkup BRMP Hortikultura				Surat	1 Hari	Surat	
2	Menerima dan mengumpulkan LAKIN dari Balai lingkup BRMP Hortikultura, merekap, mengkompilasi, mengolah dan menyusun draft LAKIN Lingkup BRMP Hortikultura				Berkas, LAKIN dari Balai Lingkup BRMP Hortikultura , komputer	14 Hari	LAKIN gabungan/kompilasi	
3	Mengoreksi Draft LAKIN Lingkup BRMP Hortikultura				LAKIN gabungan/kompilasi	3 Hari	Berkas	
4	Menandatangani LAKIN Lingkup BRMP Hortikultura				Berkas	1 Hari	Berkas	
5	Menjilid, menggandakan dan mendokumentasikan LAKIN lingkup BRMP Hortikultura dan menyiapkan surat pengantar penyampaian LAKIN lingkup BRMP Hortikultura ke BRMP				Berkas dan surat	3 Hari	Berkas dan surat	
6	Mengoreksi surat pengantar penyampaian LAKIN lingkup BRMP Hortikultura ke BRMP				Surat	1 Hari	Berkas	
7	Menandatangani Surat pengantar menyampaikan LAKIN lingkup BRMP Hortikultura ke BRMP				Berkas	1 Hari	Berkas	
8	Menyerahkan ke Bagian Pelaporan Sekretariat BRMP				Berkas	1 Hari	Berkas	

Lampiran 2. SK tim Penyusun LAKIN

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
NOMOR : 103/KPTS/PW.160/H.3/7/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 57/KPTS/PW.160/H.3/6/2025 TENTANG KEPUTUSAN KEPALA PUSAT TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIN) LINGKUP PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN 2025

KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kousi dan nepotisme menuju tercapainya tata Kelola pemerintahan yang baik (*good govermance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam suatu laporan kinerja;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
c. bahwa pegawai yang tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun 2025.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 566, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 08 November 2024 Tentang Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 Tanggal 7 Maret 2013 Tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 Tanggal 8 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Hidup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
18. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian TA 2025.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor DIPA-018.09.2.025227/ 2025 Tanggal 2 Desember 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 57/KPTS/PW.160/H.3/6/2025 TENTANG KEPUTUSAN KEPALA PUSAT TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIN) LINGKUP PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN 2025

KESATU : Tim Penyusun Laporan Akutanbilitas Kinerja (LAKIN) Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Laporan Akutanbilitas Kinerja (LAKIN) :

1. Mengumpulkan dan mengolah capaian kinerja dan keuangan lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
2. Menyusun LAKIN Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun 2025;
3. Menyampaikan LAKIN kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Laporan Akutanbilitas Kinerja (LAKIN) bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan dibebankan kepada DIPA UK/UPT Lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 28 Juli 2025

KEPALA PUSAT,

INTI PERTIWI NASHWARI
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
Nomor : 103/KPTS/PW.160/H.3/7/2025
Tanggal : 28 Juli 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIN) LINGKUP PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TAHUN 2025

Penanggung Jawab	:	Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
Ketua Merangkap Anggota	:	Kelompok Program dan Evaluasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
Sekretaris Merangkap Anggota	:	Tim Kerja Evaluasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
Anggota	:	1. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura 2. Kelompok Pengelolaan Hasil Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura 3. Tim Kerja Program Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura 4. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran 5. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika 6. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias 7. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika

KEPALA PUSAT,

INTI PERTIWI NASHWARI
NIP 197804232002122002

Lampiran 3. Keragaan SDM Lingkup PPMP Hortikultura TA 2025

Distribusi Pegawai Lingkup PPMP Hortikultura Berdasarkan Golongan

UPT	Golongan							Jumlah
	IV	III	II	IX	VII	V	I	
BRMP Hortikultura	6	23	3	5	0	1	0	38
BRMP Tanaman Sayuran	1	55	31	2	0	9	0	98
BRMP Tanaman Buah Tropika	3	68	17	6	1	11	2	108
BRMP Tanaman Hias	1	42	14	4	0	11	0	72
BRMP Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	3	41	17	1	0	6	0	68
Jumlah	**14**	**229**	**82**	**18**	**1**	**38**	**2**	**384**

Distribusi Pegawai Lingkup PPMP Hortikultura Berdasarkan Pendidikan Akhir

Unit Kerja	Pendidikan Akhir				
	S3	S2	S1/D4	<S1	Jumlah
BRMP Hortikultura	2	9	18	9	38
BRMP Tanaman Sayuran	5	11	26	56	98
BRMP Tanaman Buah Tropika	3	13	31	61	108
BRMP Tanaman Hias	2	7	20	43	72
BRMP Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	4	11	22	31	68
Total	**16**	**51**	**117**	**200**	**384**

Distribusi Pegawai Lingkup PPMP Hortikultura Berdasarkan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
BRMP Hortikultura	15	23	38
BRMP Tanaman Sayuran	58	40	98
BRMP Tanaman Buah Tropika	58	50	108
BRMP Tanaman Hias	54	18	72
BRMP Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	27	41	68
Total	**212**	**172**	**384**

Lampiran 4. Sasaran Kegiatan, Indikator Sasaran Kegiatan, dan Realisasi 2025

Kegiatan/Sasaran Kegiatan	IKSP	Volume		Alokasi (Juta)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tersedianya Produk Usahatani Hortikultura yang Berkualitas	Persentase Produk Usahatani Hortikultura yang Tersertifikasi	-	-	-	-
Meningkatnya Adopsi Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura	Persentase Peningkatan Adopsi Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura	-	-	-	-
Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	86,00 Nilai	88,17 Nilai	Rp8.271.248.000	Rp8.233.701.222
Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	92,00 Nilai	99,17 Nilai	Rp24.650.000	Rp24.511.500

Lampiran 5. Perubahan Perjanjian Kinerja PPMP Hortikultura Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Awal

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA
JALAN TENTARA PELAJAR NO. 3C CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON: (0251) 7565366, 7565368, 7568709, FAKSIMILI (0251) 7565366, 7568709
WEBSITE: www.hortikultura.bsip.pertanian.go.id E-mail: bsip.hortikultura@pertanian.go.id, bsip.hortikultura@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Husnain
Jabatan : Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Fadjry Djufry	Husnain

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN HORTIKULTURA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan*	-
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan *	-
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	86,00 Nilai
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	87,00 Nilai

KEGIATAN		ANGGARAN
1 Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	Rp.	7.554.027.000
2 BPSI Tanaman Sayuran	Rp.	13.866.113.000
3 BPSI Tanaman Buah Tropika	Rp.	15.349.088.000
4 BPSI Tanaman Hias	Rp.	10.035.301.000
5 BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	Rp.	10.102.356.000

Jakarta, 2 Desember 2024

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Fadjry Djufry

Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura

Husnain

**) Belum ada anggaran masih menunggu SOTK badan baru*

Perjanjian Kinerja Revisi Ke-1 PPMP Hortikultura

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
JALAN TENTARA PELAJAR NO. 3C CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON: (0251) 8372096, 7565366, FAKSIMILI (0251) 8372096, 8387651, 8575664
WEBSITE: www.hortikultura.brmp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Husnain
Jabatan : Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Mei 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Fadjry Djufry	Husnain

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas produk usaha tani hortikultura	Presentase produk usaha tani hortikultura yang tersertifikasi	-
2.	Tersedianya adopsi teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian hortikultura	Presentase pemenuhan kebutuhan benih sumber hortikultura	-
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	86,00 Nilai
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	87,00 Nilai

KEGIATAN		ANGGARAN
1. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	Rp.	8.789.027.000
2. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	Rp.	14.701.113.000
3. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	Rp.	16.184.088.000
4. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	Rp.	10.820.301.000
5. Balai Perakitan dan Pengujian Jeruk dan Buah Subtropika	Rp.	10.937.356.000

Jakarta, 26 Mei 2025

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Fadjry Djufry

Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Husnain

Perjanjian Kinerja Revisi Ke-2 PPMP Hortikultura

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
JALAN TENTARA PELAJAR NO. 3C CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON: (0251) 8372096, 7565366, FAKSIMILI (0251) 8372096, 8387651, 8575664
WEBSITE: www.hortikultura.brmp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Inti Pertiwi Nashwari
Jabatan : Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Juli 2025

Pihak Kedua

Fadjry Djufry

Pihak Pertama

Inti Pertiwi Nashwari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas produk usaha tani hortikultura	Persentase produk usaha tani hortikultura yang tersertifikasi	-
2.	Tersedianya adopsi teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian hortikultura	Persentase pemenuhan kebutuhan benih sumber hortikultura	-
3.	Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	82,00 Nilai
4.	Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	92,80 Nilai

KEGIATAN		ANGGARAN
1. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	Rp.	8.789.027.000
2. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	Rp.	14.701.113.000
3. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	Rp.	16.184.088.000
4. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	Rp.	10.820.301.000
5. Balai Perakitan dan Pengujian Jeruk dan Buah Subtropika	Rp.	10.937.356.000

Jakarta, 9 Juli 2025

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Fadjry Djufry

Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Inti Pertiwi Nashwari

Perjanjian Kinerja Revisi Ke-3 PPMP Hortikultura

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
JALAN TENTARA PELAJAR NO. 3C CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON: (0251) 8372096, 7565366, FAKSIMILI (0251) 8372096, 8387651, 8575664
WEBSITE: www.hortikultura.brmp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Inti Pertiwi Nashwari
Jabatan : Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 19 September 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Fadjry Djufry	Inti Pertiwi Nashwari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas produk usaha tani hortikultura	Persentase produk usaha tani hortikultura yang tersertifikasi	-
2.	Tersedianya adopsi teknologi digital, smart farming, dan modern dalam penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian hortikultura	Persentase pemenuhan kebutuhan benih sumber hortikultura	-
3.	Terwujudnya birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	82,00 Nilai
4.	Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	92,80 Nilai

KEGIATAN		ANGGARAN
1. Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	Rp.	8.245.628.000
2. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	Rp.	16.711.991.000
3. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	Rp.	16.921.997.000
4. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	Rp.	10.861.921.000
5. Balai Perakitan dan Pengujian Jeruk dan Buah Subtropika	Rp.	10.252.722.000

Bogor, 19 September 2025

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Fadjry Djufry

Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Inti Pertiwi Nashwari

Perjanjian Kinerja Revisi Ke-4 PPMP Hortikultura

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
JALAN TENTARA PELAJAR NO. 3C CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON: (0251) 8372096, 7565366, FAKSIMILI (0251) 8372096, 8387651, 8575664
WEBSITE: www.hortikultura.bmp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Inti Pertiwi Nashwari

Jabatan : Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 31 Desember 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Fadjry Djufry	Inti Pertiwi Nashwari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
		UTAMA		
1	Tersedianya Produk Usahatani Hortikultura yang Berkualitas	1.1. Persentase Produk Usahatani Hortikultura yang Tersertifikasi	-	-
2	Meningkatnya Adopsi Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura	2.1. Persentase Peningkatan Adopsi Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern Dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura	-	-
		LAINNYA		
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3.1. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	86,00	Nilai
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	92,00	Nilai

Kode	Program/ Kegiatan		Anggaran (Rp)*
EC	**Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**	**Rp**	**3.730.309.000**
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	**Rp**	3.730.309.000
HA	**Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**	**Rp**	**2.604.402.000**
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	**Rp**	2.604.402.000
WA	**Dukungan Manajemen**	**Rp**	**58.968.563.000**
6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	**Rp**	58.968.563.000
		Rp	**65.303.274.000**

Kepala Badan Perakitan dan
Modernisasi Pertanian

Fadjry Djufry

Bogor, 31 Desember 2025
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura

Inti Pertiwi Nashwari

Termasuk anggaran UPT yg dikoordinasikan/dibina

Lampiran 6. Nilai ZI Tahun 2025

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204
WEBSITE: www.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption,* 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

11. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil penilaian internal terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada enam area perubahan, meliputi:
1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tatalaksana;
3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Penguatan Pengawasan; dan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Hasil Penilaian Mandiri digunakan sebagai bahan:
a. evaluasi internal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
b. penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan pada setiap area perubahan;
c. pemenuhan data dukung dalam rangka pengusulan unit kerja menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

KEEMPAT : Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas secara berkala dan melaporkannya kepada Kepala Badan.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2025

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 1550/Kpts/PW.410/12/2025
TENTANG
HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025

No.	Satuan Kerja	Nilai
1	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	90,06
2	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat	89,38
3	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	88,86
4	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	88,81
5	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan	88,76
6	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan	88,68
7	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	88,63
8	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo	88,55
9	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten	88,51
10	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang	88,40
11	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	88,25
12	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	88,24
13	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	88,21
14	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	88,19
15	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	88,17
16	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	88,05
17	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	88,02
18	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	87,86
19	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	87,85
20	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	87,68
21	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	87,33
22	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	87,28
23	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	87,24
24	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	87,00

No.	Satuan Kerja	Nilai
25	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	87,00
26	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	86,89
27	Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	86,87
28	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia	86,84
29	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	86,67
30	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	86,63
31	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua	86,56
32	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	86,40
33	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	86,28
34	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	86,10
35	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku	86,10
36	Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	86,09
37	Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	86,09
38	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara	86,04
39	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	85,64
40	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah. Obat, dan Aromatik	85,62
41	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur	85,59
42	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	85,53
43	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	85,50
44	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	85,47
45	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta	84,91
46	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	84,59
47	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	84,49
48	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara	84,47
49	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan	84,30
50	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	84,20
51	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat	84,17
52	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali	84,10
53	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	84,01
54	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	83,78
55	Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa	83,72
56	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh	83,52

No.	Satuan Kerja	Nilai
57	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	83,48
58	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	83,44
59	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	83,14
60	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	82,52
61	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur	82,15
62	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah	82,07
63	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara	81,76
64	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	80,99

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Desember 2025

KEPALA BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat/Balai Besar lingkup Badan Perakitan Pertanian; dan
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 7. Daftar SNI Lingkup PPMP Hortikultura TA. 2025

No	Judul SNI	Konseptor	Status Perumusan
1	SNI 9410:2025 Benih kentang (*solanum tuberosum L.*) stek berakar kelas benih dasar	BPP Tanaman Sayuran	Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 745/KEP/BSN/12/2025
2	SNI 3211:2025 Manggis	BPP Tanaman Buah Tropika	Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 742/KEP/BSN/12/2025
3	SNI 7852:2025 Daun potong pakis *leather leaf*	BPP Tanaman Hias	Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 743/KEP/BSN/12/2025
4	SNI 9409:2025 Jeruk siam	BRMP Jeruk dan Buah Subtropika	Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 744/KEP/BSN/12/2025

Lampiran 8. Matriks Renaksi

TABEL KENDALI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TA. 2025

No	Sasaran Program		IKSP/IKSK/IKA		Satuan	Target	Penanggung jawab	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut	Keterangan/ Evidence
										Fisik	Persen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15
1	SP1	Tersedianya Produk Usahatani Hortikultura yang Berkualitas	1	Persentase Produk Usahatani Hortikultura yang Tersertifikasi	-	-	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	B01 :	Perencanaan, koordinasi dengan pihak terkait, penyusunan RAB kegiatan produk usahatani hortikultura yang tersertifikasi	-	-	Tidak ada anggaran yang diakibatkan refocusing	-	-	-
								B02 :	Persiapan, penyusunan proposal kegiatan dan penentuan pelaku usaha tani	-	-	Tidak ada anggaran yang diakibatkan refocusing	-	-	-
								B03 :	Sosialisasi kegiatan kepada pelaku usaha tani, identifikasi awal kesiapan sertifikasi, dan pengumpulan data pendukung	-	-	Tidak ada anggaran yang diakibatkan refocusing	-	-	-
								B04 :	Pendampingan teknis penerapan standar serta penyusunan dan perbaikan dokumen persyaratan sertifikasi	-	-	Tidak ada anggaran yang diakibatkan refocusing	-	-	-
								B05 :	Pendampingan lanjutan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan sertifikasi	-	-	Tidak ada anggaran yang diakibatkan refocusing	-	-	-
								B06 :	Fasilitasi pendaftaran sertifikasi ke lembaga sertifikasi dan persiapan pelaksanaan audit sertifikasi	-	-	Tidak ada anggaran yang diakibatkan refocusing	-	-	-
								B07 :	Pelaksanaan audit sertifikasi dan pendampingan pelaku usaha tani selama proses audit	-	-	Tidak ada anggaran yang diakibatkan refocusing	-	-	-
								B08 :	Pelaksanaan audit sertifikasi dan pendampingan pelaku usaha tani selama proses audit	-	-	Tidak ada anggaran yang diakibatkan refocusing	-	-	-

								B09 :	Tindak lanjut dan perbaikan atas temuan hasil audit sertifikasi	-	-	Tidak ada anggaran yang diakibatkan refocusing	-	-	-
								B10 :	Finalisasi proses sertifikasi dan penerbitan sertifikat produk usahatani hortikultura	-	-	Tidak ada anggaran yang diakibatkan refocusing	-	-	-
								B11 :	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sertifikat serta pemutakhiran data capaian indikator kinerja	-	-	Tidak ada anggaran yang diakibatkan refocusing	-	-	-
								B12 :	Evaluasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	-	-	Tidak ada anggaran yang diakibatkan refocusing	-	-	-
2	SP2	Meningkatnya Adopsi Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura	1	Persentase Peningkatan Adopsi Teknologi Digital, Smart Farming, dan Modern dalam Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Hortikultura	-	-	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	B01 :	Perencanaan kegiatan, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta penyusunan RAB pengembangan adopsi teknologi digital dan smart farming hortikultura	-	-	Tidak ada anggaran yang diakibatkan refocusing	-	-	-
								B02 :	Persiapan kegiatan, penyusunan proposal, serta penetapan lokasi dan pelaku usaha tani/pelaku usaha hortikultura sasaran	-	-	Tidak ada anggaran yang diakibatkan refocusing	-	-	-
								B03 :	Sosialisasi penerapan teknologi digital, smart farming, dan teknologi modern kepada pelaku usaha hortikultura serta pengumpulan data baseline adopsi teknologi	-	-	Tidak ada anggaran yang diakibatkan refocusing	-	-	-
								B04 :	Identifikasi kebutuhan teknologi dan kesiapan sarana prasarana pendukung penyiapan PSP, budidaya, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran	-	-	Tidak ada anggaran yang diakibatkan refocusing	-	-	-

								B05 :	Fasilitasi penyediaan dan instalasi awal teknologi digital, smart farming, dan teknologi modern sesuai kebutuhan lokasi sasaran	-	-	Tidak ada anggaran yang diakibatkan refocusing	-	-	-
								B06 :	Bimbingan teknis dan pendampingan penggunaan teknologi digital, smart farming, dan teknologi modern kepada pelaku usaha hortikultura	-	-	Tidak ada anggaran yang diakibatkan refocusing	-	-	-
								B07 :	Implementasi penerapan teknologi digital, smart farming, dan teknologi modern pada kegiatan penyiapan PSP dan budidaya hortikultura	-	-	Tidak ada anggaran yang diakibatkan refocusing	-	-	-
								B08 :	Implementasi penerapan teknologi digital, smart farming, dan teknologi modern pada kegiatan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil hortikultura	-	-	Tidak ada anggaran yang diakibatkan refocusing	-	-	-
								B09 :	Monitoring dan evaluasi tingkat adopsi teknologi serta pengumpulan data capaian sementara indikator kinerja	-	-	Tidak ada anggaran yang diakibatkan refocusing	-	-	-
								B10 :	Pendampingan lanjutan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, smart farming, dan teknologi modern	-	-	Tidak ada anggaran yang diakibatkan refocusing	-	-	-
								B11 :	Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pengukuran peningkatan adopsi teknologi digital, smart farming, dan teknologi modern	-	-	Tidak ada anggaran yang diakibatkan refocusing	-	-	-
								B12 :	Finalisasi data capaian indikator kinerja dan penyusunan laporan kegiatan	-	-	Tidak ada anggaran yang diakibatkan refocusing	-	-	-

3	SP3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	1	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	Nilai	86,00	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	B01:	Persiapan: koordinasi dengan pihak terkait dalam hal persiapan pengumpulan eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi, pembuatan SK Tim ZI	-	5	-	-	-	Masih dalam tahap perencanaan kegiatan Pembangunan ZI
								B02:	Kompilasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar 10%	-	10	-	-	-	Beberapa kegiatan telah dilaksanakan
								B03:	Kompilasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar 20%	-	20	-	-	-	- Penyusunan laporan hasil survey SPKP dan SPAK -. Pengisian LKE dan pengumpulan evidence
								B04:	Kompilasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar 30%	-	30	-	-	-	- Penyusunan SOP Makro dan Mikro -. Pengisian Kertas Kerja Maturitas SPIP
								B05:	Kompilasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar 40%	-	40	-	-	-	- Penyebarluasan link survey SPKP dan SPAK TW II ke stake holder
								B06:	Kompilasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar 50%	-	50	-	-	-	- Penyusunan laporan hasil survey SPKP dan SPAK TW II -. Penyusunan Renaksi SPI KPK -. Persiapan Sosialisasi SPI KPK Tahun 2025
								B07:	Kompilasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar 60%	-	60	-	-	-	- Sosialisasi SPI KPK lingkup BRMP Hortikultura oleh Inspektorat Investigasi -. Penyusunan laporan SPIP bulanan dan TW -. Penyusunan laporan survey SPKP dan SPAK TW II
								B08:	Kompilasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar 70%	-	70	-	-	-	- Peningkatan SDM -. Penyusunan laporan bulanan

								B09:	Kompilasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar 80%	-	80	-	-	-	- Pelaksanaan survey SPI KPK -- Penyuusunan laporan SPKP dan SPAK TW III - Penyusunan laporan bulanan dan TW III
								B10:	Kompilasi eviden atau data dukung mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar 95%	-	95	-	-	-	
								B11:	Validasi nilai dan data dukung penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan target 86,00	-		-	-	-	
								B12:	Pelaksanaan evaluasi silang ZI lingkup BRMP	-		-	-	-	Hasil penilaian silang ZI lingkup BRMP yaitu 88,17
4	SP4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	Nilai	92,00	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	B01:	Tersusunnya DIPA dan RPD, sasaran kegiatan masih berupa nilai NKA	-	-	-	-	-	Penginputan capaian output untuk indikator kinerja nilai kinerja perencanaan anggaran belum dapat dilakukan
								B02:	Pelaksanaan anggaran berjalan sesuai RPD dengan ketepatan waktu pengajuan SPM dan tanpa kesalahan administrasi, sasaran kegiatan masih berupa nilai NKA	-	-	-	-	-	Penginputan capaian output untuk indikator kinerja nilai kinerja perencanaan anggaran belum dapat dilakukan
								B03:	Realisasi anggaran triwulan I tercapai sesuai target IKPA, sasaran kegiatan masih berupa nilai NKA	-	-	-	-	-	Penginputan capaian output untuk indikator kinerja nilai kinerja perencanaan anggaran belum dapat dilakukan
								B04:	Pelaksanaan kegiatan dan kontrak berjalan sesuai jadwal dengan kualitas belanja yang tertib dan akuntabel, sasaran kegiatan masih berupa nilai NKA	-	-	-	-	-	Penginputan capaian output untuk indikator kinerja nilai kinerja perencanaan anggaran belum dapat dilakukan

								B05:	Pelaksanaan kegiatan dan kontrak berjalan sesuai jadwal dengan kualitas belanja yang tertib dan akuntabel, sasaran kegiatan masih berupa nilai NKA	-	-	-	-	-	Nilai NKA 49,87
								B06 :	Pelaksanaan kegiatan dan kontrak berjalan sesuai jadwal dengan kualitas belanja yang tertib dan akuntabel	-	-	-	-	-	Capaian Nilai IKPA 100
								B07 :	Pelaksanaan kegiatan dan kontrak berjalan sesuai jadwal dengan kualitas belanja yang tertib dan akuntabel	-	-	-	-	-	Capaian Nilai IKPA 98,7
								B08 :	Pelaksanaan kegiatan dan kontrak berjalan sesuai jadwal dengan kualitas belanja yang tertib dan akuntabel	-	-	-	-	-	Capaian Nilai IKPA 99,57
								B09:	Penyerapan anggaran konsisten sesuai rencana tanpa penumpukan tagihan	-	-	-	-	-	Capaian Nilai IKPA 99,78
								B10:	Optimalisasi realisasi anggaran secara efisien dan sesuai prinsip akuntabilitas belanja	-	-	-	-	-	Capaian Nilai IKPA 99,13
								B11:	Sebagian besar kewajiban pembayaran kegiatan terselesaikan dengan capaian IKPA kategori baik	-		-	-	-	Capaian Nilai IKPA 99,85
								B12:	Seluruh kewajiban anggaran terselesaikan tepat waktu dengan tercapainya target Nilai IKPA	-		-	-	-	Nilai IKPA TA. 2025 yaitu 99,79

Kepala Pusat,

Dr. Ir. Ati Pertiwi Nashwari, S.P., M.Si.
NIP 197004232002122002

LAPORAN KINERJA 2025

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Jalan Tentara PelajarNo. 3C Cimanggu, Bogor 16111
Telp. (0251)7565366, 7568708
Fax. (0251)7565366, 7568709
Email: brmp.hortikultura@pertanian.go.id
brmp.hortikultura@gmail.com